

PENDIDIKAN POLITIK KEBANGSAAN

Upaya Preventif Menghadapi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

PENDIDIKAN POLITIK KEBANGSAAN

Upaya Preventif Menghadapi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Wira Hadikusuma
Fatrica Syafri
Pebri P.
Musyaffa



**PENDIDIKAN POLITIK KEBANGSAAN
Upaya Preventif Menghadapi Politik Identitas
Jelang Pemilu 2024**

© Wira Hadikusuma, dkk.

viii + 104 halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: Dalam Proses

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari
penerbit.

Cetakan I, November 2023

Penulis : Wira Hadikusuma

Fatrica Syafri

Pebri P.

Musyaffa

Editor : Hanita Ayu

Sampul : Bagus

Layout : Satrio

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.22 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

PRAKATA

Terucap syukur ke hadirat Allah Swt, akhirnya tim penulis berhasil menyusun modul *Pendidikan Politik Kebangsaan: Upaya Preventif Menghadapi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024*. Modul yang dibuat sebagai tanggung jawab moral penulis tentang kondisi perpolitikan di tanah air. Modul ini dibuat agar menjadi literasi penunjang bagi para civitas akademika terutama dosen yang mengajar pada mata kuliah rumpun Kebangsaan atau Nasional, dan rumpun mata kuliah Komunikasi dan Politik, serta mahasiswa di perguruan tinggi Keagamaan Islam (PTKI), terutama di wilayah administrasi Provinsi Bengkulu.

Modul ini memberikan khazanah keilmuan dan bahan literasi positif bagi para pembacanya. Setidaknya, terdapat kerangka alternatif terhadap upaya melerai isu politik identitas. Terutama, beberapa hal yang dikhawatirkan membahayakan stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Sebab, ada beberapa jenis ‘politik identitas’ yang ‘dangerous’ tersebut perlu diwaspadai. Narasi negatif yang muncul akan mengakibatkan konsekuensi logis di kemudian hari. Maka, narasi negatif yang berkaitan dengan politik identitas perlu untuk diblokade dengan narasi positif yang mengusung tema kebangsaan. Tema kebangsaan sebagai jalan tengah (*washatiyah*) yang memberikan perspektif lain dari jalan berpolitik di Indonesia. Sebab, keberagaman (*diversity in all*) adalah realitas Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Tak terbanyangkan, tatkala kelompok minoritas tidak dapat berbuat banyak untuk menunjukkan hak dan kebebasannya dalam berpolitik, dan kelompok mayoritas terus mengukuhkan eksistensinya dengan ‘menjual’ identitasnya. Maka, modul ini menawarkan solusi preventif, yakni program kerja dan visi-misi kontestan politik adalah yang *tawasuth* (tengah-tengah). Kedua hal itu, program kerja, dan visi-misi adalah satu perangkat komoditas politik yang harus terus-menerus didengungkan dan dikampanyekan di masyarakat.

Melalui modul ini, kontestan politik berikut para konsultannya, tim sukses dan penggembira/pendukungnya menghindari politik identitas yang ‘menjual’ hal-hal terkait SARA (suku, agama, ras, antargolongan). Pada tataran tingkat nasional, tidak lagi menjual dimensi ‘Islam’ sebagai jualan kampanye. Pada tataran politik daerah Provinsi Bengkulu, tidak lagi menjual ‘Putra Daerah’ dan ‘unsur agama’ sebagai jualan utamanya. Sebab, di daerah maju, megapolitan, seperti Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta, sudah tiga periode dipimpin oleh putra daerah lain. Sebab, putra daerah lain justru ‘dianggap’ dapat menjawab tantangan dan mengurai persoalan pelik di Ibukota.

Akhirnya, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tim juga sangat menanti uluran saran, sumbangan pemikiran, dan kritik konstruktif-solutif, demi menyempurnakan gagasan politik kebangsaan dalam mengatasi politik identitas jelang Pemilu 2024 mendatang.

Bengkulu, 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
Bab 1 Pendidikan Politik Kebangsaan.....	1
Bab 2 Politik Identitas	5
Bab 3 Isu SARA dan Komoditas Politik.....	15
Bab 4 Adu Gagasan dan Alternatif Politik Kebangsaan	21
Bab 5 Bahayanya Politik Identitas.....	25
Bab 6 Moderasi Beragama di PTKI: Alternatif Menghindari Politik Identitas.....	29
Bab 7 Mata Kuliah Kebangsaan di PTKI	47
Bab 8 Organisasi Mahasiswa dan Politik Kebangsaan.....	61
Bab 9 Netizen Media Sosial dan Isu Politik Identitas	75
Bab 10 Pemilu 2024 dan Resistensi Politik Identitas	83
DAFTAR PUSTAKA	97
PROFIL PENULIS	101

Bab 1

PENDIDIKAN POLITIK KEBANGSAAN

A. Uraian

Seorang pengajar di Pusat Pengembangan Mata Kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, Niyoko menyebutkan, bahwa pendidikan politik kebangsaan secara makro bagian dari pendidikan nasional. Namun, secara mikro, pendidikan politik kebangsaan berada pada ruang lingkup supra dan infrastruktur politik, lembaga eksekutif dan legislatif, kekuatan-kekuatan sosial politik, dan organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, pendidikan politik harus menanamkan nasionalisme, tanggung jawab, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta keadilan. Niyoko (2019) mengapresiasi pendidikan politik kebangsaan yang telah dilakukan oleh beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Sebab, menurutnya, hal itu akan mampu mendewasakan organisasi kekuatan sosial politik.

Tidak secara eksplisit mendefinisikan pendidikan politik kebangsaan, Maftutah menggambarkan politik kebangsaan terangkum setidaknya pada empat mata pelajaran di sekolah. Maftutah dalam penelitiannya, menalaah kurikulum pada Madrasah Aliyah. Menurutnya, empat mata pelajaran yang memuat pendidikan politik kebangsaan terefleksikan pada pelajaran Kewarganegaraan/Pendidikan Moral Pancasila (PMP)/Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Sejarah Nasional, dan Tata Negara (Maftutah, 2012). Sedikit berbeda dengan Maftutah, Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anggi Afriansyah, menyebutkan, pendidikan politik kebangsaan di lembaga pendidikan sekolah menengah, setidaknya tercermin pada mata pelajaran, seperti: PPKn, Sosiologi, Sejarah, dan pelajaran ilmu sosial lainnya yang memungkinkan adanya penguatan cara pandang mengenai politik demokratis. Adapun implementasinya, mata pelajaran harus dilakukan dengan metode *problem posing*, dan tidak satu arah. Pendidikan politik kebangsaan di sekolah juga dapat dilakukan melalui aktivitas organisasi di sekolah (Afriansyah, 2020).

Hal lainnya, masih terkait dengan pendidikan politik, terutama pada pendidikan di pesantren. Romy Hermawan dan Rispa Ngindana dari Universitas Brawijaya menyebutkan, bahwa *political education* ini urgent sangat dibutuhkan bagi para santriwan dan santriwati serta pengurus pondok pesantren, terutama untuk menghapus stigma negatif kalangan tersebut terhadap arti politik di kalangan masyarakat yang selama ini diartikan negatif (Hermawan dan Ngindana, 2020). Dua peneliti tersebut memasukkan beberapa materi penting terkait pendidikan politik kebangsaan di pesantren. Materi tersebut antara lain: terminologi politik, kegunaan politik, urgensi pendidikan politik, informan, jenis-jenis keaktifan politik, demokrasi politik, 11 pilar sistem warga bangsa, peran politik, kearifan politik, persatuan dan kesatuan, serta menjadi warga negara yang berperan aktif.

B. Latihan

Mahasiswa dapat mengerjakan soal latihan secara individu maupun berkelompok.

1. Jelaskan secara singkat pengertian Pendidikan politik kebangsaan menurut Niyoko?

2. Jelaskan dan sebutkan beberapa mata kuliah yang ada relevansinya dengan pendidikan politik kebangsaan menurut Maftutah?
3. Bagaimana seharusnya implementasi pendidikan politik kebangsaan menurut Anggi Afriansyah?
4. Apa urgensi pendidikan politik kebangsaan di Lembaga pendidikan Islam, misalnya di pesantren?
5. Sebutkan materi pendidikan politik kebangsaan yang relevan untuk diterapkan di Lembaga pendidikan, terutama di perguruan tinggi keagamaan Islam!

ProofRead
SB

ProofRead
SB

Bab 2

POLITIK IDENTITAS

A. Uraian

Menurut penulis, politik identitas berupaya untuk menggali potensi demi menggalang kekuatan massa, dengan memanfaatkan segala bentuk potensi penggolongan (primordialisme) di masyarakat. Bagai dua sisi mata pisau berbeda, politik identitas dapat memberi keuntungan, tapi juga dapat menimbulkan potensi kerugian. Hal demikian diungkapkan oleh Agens Heller. Heller menyebutkan bahwa politik identitas sederhananya dapat diartikan salah satu *political strategy* yang menfokuskan pada perbedaan serta kebermanfaatan hubungan primordial yang merupakan bagian utama. Menurutnya, politik identitas dapat memicu rasa toleran dan keberagaman berpikir, namun di sisi lain, politik identitas juga akan memicu terbentuknya sikap intoleransi, kekerasan fisik-verbal, dan juga perselisihan bahkan keributan setiap kultur dalam kehidupan (Rozi 2019). Bunga Monika Arisanti memahami politik identitas sebagai upaya politik dengan menggalang kekuatan kelompok tertentu. Menurutnya, politik identitas identik dengan cara melaksanakan politik yang mengedepankan keuntungan kelompok yang mana didasari oleh persamaan identitas, seperti, gender, agama, kultur, dan lain-lain (Arisanti 2022).

Kemudian, pengertian politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk

perlawan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Menurut Sri Astuti Buchari, bahwa politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu. Politik identitas lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu. Hal itu menurut suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik. Hal demikian dapat disimpulkan bahwa politik identitas merupakan alat perjuangan yang dipakai suatu kelompok untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kelompok tersebut. Maka, politik identitas muncul ke permukaan, ketika terjadi adanya ketidakadilan atau biasanya hal tersebut juga muncul akibat adanya konflik yang melibatkan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Hal tersebut terjadi karena merasa adanya kesamaan karakteristik atau etnis serta kesukuan suatu kelompok tersebut (Alfaqi 2015).

Kemudian, terkait arah identitas, maka diperlukan sebuah cara untuk membentuk identitas tersebut, menurut Castells ada tiga pembentukan dalam membangun sebuah identitas, yaitu identitas legitimasi, identitas resisten, dan identitas proyek. Castells memahami identitas legitimasi (*legitimizing identity*), sebagai suatu identitas dari sebuah institusi. Institusi itu mendominasi suatu masyarakat yang merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial, seperti suatu institusi negara yang mencoba meningkatkan identitas kebangsaan anggota masyarakat. Institusi tersebut memang telah mendapatkan legitimasi untuk melakukan hal tersebut. Tiga pembangunan identitas tersebut yang membentuk politik identitas. Politik identitas muncul sebagai alat suatu kelompok untuk menegaskan jati dirinya serta sebagai proses perjuangan suatu kelompok tersebut. Mulai dari perjuangan untuk legitimasi identitas suatu kelompok, memperjuangkan ketidakadilan dalam kondisi tertekan oleh kelompok yang lainnya, serta alat perjuangan untuk proyek identitas yang bertujuan untuk membentuk suatu identitas yang baru.

L.A. Kauffman menyebutkan bahwa hakikat politik identitas dapat ditelusuri dengan melihat asal-usul gerakan mahasiswa anti-kekerasan. Gerakan tersebut familiar dengan sebutan SNCC (The Student Nonviolent Coordinating Committee). SNCC merupakan organisasi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960-an. Muncul pertanyaan bahwa siapakah sebenarnya yang menciptakan istilah politik identitas itu pertama kali? Hingga saat ini, belum ada literasi otentik yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi secara asumtif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperlakukan tidak adil oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Di Amerika Serikat, para penggagas teori politik identitas berdalil bahwa bermula dari praktik pemerasan. Melalui praktik pemerasan tersebut, ternyata menyadarkan golongan yang diperlakukan tidak adil, khususnya masyarakat kulit hitam, masyarakat yang berbahasa Spanyol, dan etnis-ethnis lainnya yang merasa terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal yang umumnya dikuasai oleh golongan kulit putih tertentu.

Politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kesungguhan dan tanggung jawab inilah yang sering benar dipermainkan oleh orang yang larut dalam pragmatisme politik. Lantas, orang-orang tersebut dianggap tuna-moral dan tuna-visi. Sikap tidak relevan dan memicu permusuhan terbesar di tanah air dari waktu ke waktu. Demikian, Maarif sampaikan dalam kegiatan bertajuk *Nurcholish Madjid Memorial Lecture* (Maarif, 2012).

Masih berikut pada pemikiran Nurcholish Madjid. Fuatanu (2020) pernah menuliskan ulasannya, lalu ia korelasikan dengan

kondisi pilgub di DKI Jakarta pada 2017. Setidaknya ada tiga kesimpulan oleh Fautanu. Kesimpulan tersebut antara lain: *Pertama*, bahwa pemikiran politik identitas masyarakat Muslim pada Pilkada DKI Jakarta pada kondisi netral. Politik identitas yang dimunculkan tidak selalu negatif, dan atau tidak selalu selalu positif. Fautanu menyimpulkan bahwa pada politik identitas merupakan hal yang lumrah pada budaya politik. Maka, perlu kepiawaian semua pihak untuk mengemas politik identitas menjadi lebih etis dan berperadaban. Fenomena munculnya politik identitas di masyarakat Muslim DKI Jakarta ditengarai dan dipicu atas peristiwa fenomenal. Beberapa pihak oposan menamainya dengan Aksi Bela Islam (ABI) yang diprakarsai oleh Habib Rizieq Shihab. Konsekuensi ucapan Basuki Thahya Purnama (BTP/Ahok) ditengarai melakukan penistaan agama, akibat salah memaknai QS. Al-Maidah ayat 51.

Kesimpulan kedua oleh analisis Fautanu ialah bahwa corak politik identitas masyarakat Muslim pada pilkada DKI Jakarta meliputi beberapa hal. *Pertama*, politik identitas dalam bentuk persaudaraan Muslim. *Kedua*, seharusnya menjadikan salah satu konsep musyawarah sebagai implementasi demokrasi Pancasila, dan sekaligus sebagai politik identitas masyarakat Indonesia. *Ketiga*, politik identitas masyarakat Muslim Jakarta lebih dominan merepresentasikan Islam berkearifan lokal. *Keempat*, spiritualitas keagamaan. *Kelima*, gerakan dakwah dengan memegang teguh prinsip *amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf*. *Keenam*, politik identitas masyarakat Muslim DKI Jakarta merupakan realitas yang objektif dan proporsional. *Ketujuh*, konsep Islam yang *rahmatan lil'alamin*. *Kedelapan*, identitas agama Islam memicu lahirnya politik identitas. Dan *kesembilan*, politik identitas dalam bentuk mayoritas dan minoritas masih mendominasi.

 Selanjutnya, Fatanu dalam analisisnya menyimpulkan bahwa bentuk perilaku politik identitas Masyarakat Muslim pada Pilkada DKI Jakarta dalam analisis pemikiran politik Nurcholish Madjid terejawantahkan dalam beberapa hal, yakni: *Pertama*, aksi damai ABI dalam gerakan umat 212, menggambarkan semangat persaudaraan

muslim di Jakarta. *Kedua*, gerakan dakwah dalam dimensi atau aspek politik. *Ketiga*, membangun komitmen antarumat Islam kala itu, untuk menentukan pilihan politik dan ekonomi yang mereka yakini. Dan yang paling dasar adalah membangun kesadaran hukum, sosial, ekonomi, politik, dan agama. *Keempat*, umat muslim perlu mendahulukan moral dan menjaga etika politik. *Kelima*, umat muslim perlu menciptakan dan memiliki sikap yang terbuka terhadap perbedaan, toleransi, saling menghormati, dan menerima atas kepemimpinan sekalipun dari luar golongan dan kelompoknya. *Keenam*, umat muslim perlu mengapresiasi atas capaian dan prestasi, namun dengan tetap bersikap kritis pada penyimpangan. *Ketujuh*, perilaku politik identitas masyarakat muslim Jakarta diwujudkan dalam bentuk keaktifan dalam rangka menyukseskan segala program politik. Bentuknya dapat berupa kampanye, menggerakkan serta mendukung untuk kemenangan pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 kala itu. Lalu, *kedelapan*, perilaku politik identitas yang dilakukan masyarakat Muslim Jakarta yaitu dukungan moril maupun dukungan materil mendukung pilihan politik mereka.

Pada literasi lainnya, memberikan keterangan bahwa diskursus politik identitas muncul sejak tahun 1960-an. Tepat pada 1967, melalui forum asosiasi ilmu politik internasional berkumpul untuk membicarakan tentang biologi dan politik. Politik identitas merupakan bagian dari pembahasan politik yang bersifat empiris. Eriksen memaknai politik identitas ialah kecenderungan membangun stereotip-stereotip tentang kumpulan lain ini juga sebenarnya merupakan cara mendukung dan membenarkan garis batas sosial ini. Lebih tepatnya, munculnya rasa etnisitas. Sebagai konsekuensi dari adanya interaksi dari kumpulan yang merasa berbeda ketika pembedaan ‘kita’ dan ‘mereka’ menjadi penting.¹

Untuk memahami makna politik identitas lebih sederhana, antara lain dapat merujuk definisi yang dikemukakan oleh Lukmantoro. Menurutnya, politik identitas adalah tindakan politik

¹ *Pendidikan Multikultural*, hal. 166.

untuk mengedepankan kepentingan dari anggota suatu kumpulan karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik atas dasar ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan. Bisa dikatakan, sinonim frase politik identitas ialah politik perbedaan. Seperti telah tersebut di atas bahwa munculnya politik identitas tidak terlepas dari adanya respons terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang sering diterapkan secara tidak adil.²

Bentuk daripada politik identitas tidak melulu pada usaha meraih kekuasaan dengan cara menjual isu SARA semata, ternyata juga dalam bentuk lainnya, seperti Peraturan Daerah (Perda) berbasis syariah, otonomi khusus kewilayahan, hingga muncul gerakan sparatisme.

Lalu, apa sebab munculnya politik identitas? Sebenarnya banyak faktor. Tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi di masa lalu, biasanya sparatisme muncul akibat adanya kesenjangan ekonomi di masa lalu, sehingga muncul asumsi-asumsi dan bias kognitif dari daerah-daerah yang jauh dari pusat ibukota. Asumsi tentang adanya sentralisasi memunculkan anasir bahwa memang pembangunan terpusat di wilayah Jakarta dan Pulau Jawa. Sementara, daerah semakin tidak menentu justru dianggap mendapatkan ‘kue’ yang selalu jauh lebih kecil daripada alokasi pulau Jawa. Sehingga, muncul istilah ‘desentralisasi’. Buahnya muncul konsep otonomi daerah, yang pada klimaksnya memunculkan raja-raja kecil di daerah. Tujuan pembangunan disesuaikan dengan keinginan daerah masih juga bias hingga saat ini. Ada daerah otonom yang maju pesat, tetapi ada juga daerah yang laju melambat, ada juga daerah yang terkesan ‘diam di tempat’.

Otonomi daerah sebagai cikal bakal upaya untuk mengurai kesenjangan ekonomi, pada dasarnya juga semakin bias, dengan hadirnya pemilu kepala daerah (pilkada). Sejak awal adanya pilkada, baik pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan bupati (pilbup), atau

² *Ibid*, hal. 167

pemilihan walikota (pilwakot), nyatanya justru menimbulkan berbagai masalah sosial. Pola pemilihan yang terkesan tendensius terhadap ‘putra daerah’ misalnya, menjadi masalah yang berlarut-larut. Masyarakat di daerah diajak untuk memilih putra daerah, dengan slogan bahasa daerah masing-masing, sebagai upaya elektoral, tanpa menawarkan solusi konkret mengatasi berbagai ketimpangan, terlebih ketimpangan ekonomi daerah.

Dari sini, sebenarnya telah menimbulkan gejala-gejala sosial. Munculnya politik identitas seperti itu juga dapat dilakukan dengan pendekatan *iceberg analysis* dan mencoba mencari solusi dengan pendekatan *u-analysis*. Pada konsep *iceberg analysis* memuat berbagai macam tingkatan dalam pendekatan fenomena atau masalah. *Iceberg analysis* mencoba menawarkan instrumen dalam menangani masalah sosial politik, terutama politik identitas yang mencuat di masyarakat. Polanya seperti apa? Setidaknya ada empat instrumen penting. *Pertama*, *event* (peristiwa, kegiatan, masalah, atau isu yang muncul). *Kedua*, pola perilaku. *Ketiga*, struktur sistem. *Keempat*, model mental.

Lalu, apa yang menjadi indikator munculnya politik identitas? Setidaknya ada beberapa hal, di antaranya: politisasi identitas etnik, politisasi identitas budaya, dan politisasi identitas agama. Berikut penulis jabarkan ketiga indikator munculnya identitas politik.

Pertama, politisasi identitas etnik. Identitas etnik lebih pada bersifat primordial. Semula berakar pada kebudayaan yang dihayati bersama secara kolektif baru akibat asimilasi dua atau lebih budaya yang didukung oleh perkawinan ataupun komunikasi antarbudaya di tempat kerja, sekolah, dan lain-lain. Anderson melihat bahwa bangsa adalah suatu komunitas abstrak dari sebuah bangsa, khususnya kelompok etnik. Contoh konkretnya, negara Filipina dan Indonesia merupakan negara multietnik sehingga harus membedakan antara etnik dan bangsa. Oleh karena itu, definisi sosial terhadap individu

kini berubah seiring dengan perubahan struktur kekuasaan, dominasi gender, dan kekuasaan politik, seperti hak-hak minoritas, termasuk perkembangan agama yang membatasi peran. Batas-batas dan konteks tertentu masih membutuhkan pemaknaan etnik secara kontekstual, terutama dalam suasana masyarakat yang multietnik dan multikultur.

Kedua, politisasi identitas budaya. Banyak orang kemudian diorientasikan terhadap berbagai perwujudan nilai budaya. Ada yang diorientasikan sebagai entitas dari budaya Barat. Ada juga yang menganggap suatu objek budaya merupakan manifestasi dari budaya Timur. Ada juga sebagai pihak yang menyebut adanya orientasi tetap mempertahankan entitas budaya tradisional. Sebagian pihak tetap menganggap pentingnya berubah ke arah budaya modernitas. Sehingga, ada yang berupaya mengeksplorasi sekat-sekat budaya tersebut. Ada pernyataan yang menyadarkan banyak orang, sebagai berikut:

"Dibentuk sebagian untuk tujuan politik, dibuat berlebihan sebagai untuk mempertahankan pengakuan, ditelan oleh publik yang tidak terorientasi dengan sebuah perasaan kelegaan dengan jarak aman terhadap kejadian tidak menyenangkan, perasaan kesadaran budaya dan bersamanya juga kesadaran perbedaan budaya tampaknya telah mengambil alih keadaan konfrontasi terbesar yang mendominasikan abad ke-20."

Sebuah realitas dan tak dapat dipungkiri bahwa politisasi perbedaan budaya terjadi, baik di dalam maupun dari luar.

B. Latihan

Mahasiswa dapat mengerjakan soal latihan secara individu maupun berkelompok.

1. Sebutkan dan jelaskan apa yang memotivasi adanya politik identitas!

2. Jelaskan dan sebutkan hal negatif apa saja yang ditimbulkan dari adanya politik identitas menurut Agens Heller!
3. Bagaimana Fautanu mengkorelasikan pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik identitas dengan nuansa Pilkada DKI Jakarta 2017!
4. Bagaimana bentuk perilaku politik identitas menurut Fautanu!

ProofRead
SB

ProofRead
SB

Bab 3

ISU SARA DAN KOMODITAS POLITIK

A. Uraian

Supriyadi menyadur dari Pippa Noris, menyimpulkan hasil penelitian dari Bruce, Robert dan Haidar, bahwa politisasi SARA dalam setiap pemilu di-*counter* dengan pemikiran sekularisasi. Orang-orang menjadi pemilih rasional, pilihan rasional yang berangkat dari bentuk konkret atas keberhasilan kinerja calon pemimpin. Terutama, bagi kalangan industrialisasi, perilaku-perilaku religius mulai memudar dan menafikan (*not-care*) terhadap aspek religi. (Supriyadi, 2015)

Cendikiawan muslim, Buya Syafií Maárif dalam literasinya, menyebutkan bahwa politik identitas justru terjadi pasca-kemerdekaan, tatkala di era Orde Lama, justru muncul berbagai aliran primordialisme yang tak terfasilitasi, juga menimbulkan gerakan dan kekuatan politik berdasarkan sentimen SARA (Maarif, 2012). Hingga era Reformasi Jilid II, bahkan realitas isu SARA dan upayanya dalam penguatan politik identitas kembali mencuat (Supriyadi, 2015).

Sentimen isu SARA yang melahirkan politik identitas sebagai upaya elektoral terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Supriyadi menyebutkan bahwa isu sara menjadi komoditas politik. Sekalipun,

para elite politik enggan terang-terangan menyebut politik identitas, namun pada tataran praktis, ternyata bagian dari realitas. Supriyadi bahkan menganalogikan seperti ‘*junk food*’, banyak orang menghindari karena bahaya, tetapi kenyataannya masih banyak yang menggemari. Menurutnya, isu SARA dalam konteks politik identitas juga terjadi di banyak negara di Eropa. Bahkan, negara sekuler seperti Amerika Serikat juga menggunakan politik identitas dengan memainkan isu SARA, seperti, pada pilpres (pemilihan presiden), tatkala Barack Obama selain dilabeli sebagai orang kulit hitam, tetapi juga orang yang pro-Islam. Ia lantas mendapatkan penambahan nama Barack Husein Obama. ‘Husein’ sebuah nama yang secara proximitis lebih dekat dan melekat dengan nama orang-orang Muslim.

Kembali pada konteks Indonesia, sebagaimana tersebut di atas, digambarkan pada pesta demokrasi Pilgub DKI Jakarta pada 2017. Beberapa literasi menguatkan adanya asumsi isu SARA sebagai konten politik identitas yang dijadikan sebagai komodifikasi politik utama. Terdapat tiga pasangan calon pada putaran pertama. Lalu, pada putaran kedua, menyisakan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan Ahok-Djarot akhirnya kalah suara terhadap pasangan Anies-Sandi. Salah satu sumber literasi menyebutkan bahwa paslon Anies-Sandi menyerang lawan politiknya dengan isu SARA, terutama pada konteks agama dan ras. Faktanya, masih banyak masyarakat yang tergolong pemilih tradisional. Para pemilih tradisional masih mengutamakan aspek emosional. Sebab itu, senjata agama, sebagai cara untuk mengolah emosi pemilih, khususnya muslim (Ardipandanto, 2017).

Proses R&D Arditipandanto dalam literasi berbeda, mencontohkan praktik politik identitas dengan memainkan isu SARA juga terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 (Ardipandanto, 2020). Terutama adanya upaya mengkonstruksi narasi anti-Islam atau anti-keberpihakan terhadap Islam. Hal ini merupakan bagian dari rentetan peristiwa isu SARA dalam politik identitas yang terjadi

pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Ahok yang terafiliasi dengan PDI Perjuangan yang juga merupakan partai calon presiden petahana Joko Widodo telah menjadi catatan tersendiri bagi kelompok lain. Para pemilih dan simpatisan Anies-Sandi terkonsentrasi untuk memenangkan Prabowo-Sandi, lagi-lagi konten Islam menjadi hal utama. Prabowo-Sandi dikonotasikan sebagai pasangan yang berpihak pada 'ulama' versi simpatisannya.

Sementara, Jokowi adalah calon yang dikonotasikan telah 'mengkriminalisasi ulama'. Padahal, Jokowi berupaya maksimal untuk menganulir asumsi tersebut. Salah satunya, dengan menggandeng tokoh Nahdlatul Ulama', Prof. Dr (HC), KH. Ma'ruf Amin. Namun, upaya tersebut tidak membuat kelompok simpatisan Prabowo-Sandi yang didukung Gerindra, PKS, dan PAN bergemung untuk menghilangkan isu 'Islam' sebagai komoditas politiknya. Selain menjadikan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, Jokowi juga kerap menggunakan bahasa 'Islam', seperti salam dan *muqodimah* dalam sambutan atau pidato yang selalu lengkap (hamdalah dan selawat). Hal itu merupakan pesan tersirat bahwa ia adalah seorang muslim sejati dan berpihak pada muslim. Meskipun akhirnya kontestasi tersebut tetap dimenangkan oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.

Lalu, bahaya penggunaan isu SARA pada konteks politik identitas, berdasarkan peristiwa politik di atas, antara lain: *Pertama*, timbulnya kebencian. *Kedua*, adanya polarisasi kelompok. *Ketiga*, pelabelan haram, munafik, dan kafir. *Keempat*, instabilitas keamanan, politik, sosial dan ekonomi di NKRI. Oleh karena itu, upaya presiden terpilih periode 2019-2024 Jokowi patut diapresiasi, untuk meminimalisir dan mereduksi potensi bahayanya akibat perang politik identitas, lantas ia mengajak berkerja sama dengan lawan politiknya, Prabowo-Sandi. Lantas, seiring berjalannya waktu, akhirnya Prabowo Subianto bergabung di pemerintahan dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, Sandiaga Uno didaulat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Penolakan terhadap politik identitas berkali-kali kerap digaungkan oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Ia menegaskan bahwa NU ngotot menolak politik identitas, baik identitas Islam maupun identitas NU sendiri. Sebab, menurut Gus Yahya, penolakan terhadap praktik politik identitas karena NU tidak mau masuk ke dalam dinamika kompetisi politik yang hanya melulu didasarkan pada pembelaan identitas-identitas. Karena itu, penggunaan politik identitas akan membuat kontestasi pemilu menjadi irasional atau tidak berdasar akal sehat. “Kalau NU lawan yang bukan NU, maka itu tidak ada argumen rasional di sana. Kalau bukan NU, pokoknya nggak mau. Kalau nggak qunut, nggak mau. Mulai puasanya bareng apa enggak? Kalau nggak bareng, nggak mau. Tidak ada argumentasi rasional,” kata Gus Yahya (Triono 2023).

Terkini, melalui forum Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) tahun 2023, telah menegaskan penolakan terhadap politik identitas terutama yang berkaitan erat dengan aspek agama sebagai komoditas politik. Hal tersebut tertuang dalam butir kelima Piagam Surabaya, pada 5 Mei 2023, “menolak penggunaan agama untuk kepentingan politik. Fenomena politik identitas, khususnya yang berbasis agama, harus ditolak keras”. Hal tersebut dibacakan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Ahmad Muzakki, saat penutupan AICIS 2023 ke-22 di Surabaya, Jawa Timur (Manumoyoso, 2023).

B. Latihan

Mahasiswa dapat mengerjakan soal latihan secara individu maupun berkelompok.

Practise
So Read
1. Apa yang Anda pahami dengan isu SARA?

2. Jelaskan penggunaan isu SARA dalam politik identitas sebagai senjata kampanye untuk kepentingan elektoral!

3. Berikan contoh praktik politik identitas yang menjual isu SARA pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019!
4. Sebutkan dan jelaskan bahaya penggunaan isu SARA dalam politik identitas oleh para kontestan pemilu dan simpatisannya bagi bangsa Indonesia!

ProofRead
SB

ProofRead
SB

Bab 4

ADU GAGASAN DAN ALTERNATIF POLITIK KEBANGSAAN

A. Uraian

Menariknya, pada Jumat, 2 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar acara konsolidasi yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dalam arahannya, Presiden berharap agar politik adu gagasan menjadi *tagline* Pemilu 2024 mendatang. Arahan tersebut direspon oleh KPU. KPU merespons arahan tersebut dengan merumuskan aturan dan tata pelaksanaan kampanye pada Pemilu 2024 (Amelya, 2022).

Semangat itu juga didukung oleh banyak pihak. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti dan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyampaikan pentingnya politik adu gagasan, visi-misi, dan program kerja. Hal itu didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), bahwa masyarakat menginginkan siapa pun kandidat Pemilu 2024 harus dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas (Media Indonesia, 2022).

Hal serupa juga didengungkan oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dalam kesempatan pidatonya di acara Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Ia

mengungkapkan, partai politik dapat menjembatani para pemimpin masa depan yang memiliki gagasan cemerlang dalam membangun bangsa. Ma'ruf Amin juga mewanti-wanti agar partai politik tidak memasang strategi politik identitas karena hanya akan menyebabkan polarisasi kelompok di tengah masyarakat. Menurutnya, politik identitas dapat meraup suara dan memenangkan kontestasi, tetapi dapat merusak negara. Ia berharap agar semangat persatuan Indonesia harus dikedepankan. Pancasila menjadi kunci dalam semangat demokrasi. Sebab, nilai-nilai Pancasila mengedepankan semangat toleransi yang menjunjung tinggi persatuan, dan meniadakan perbedaan SARA. Menurutnya, jangan sampai, fenomena Pemilu 2019 yang memasang politik identitas yang menyebabkan polarisasi kelompok di masyarakat malah kembali menganga di Pemilu 2024. Hal ini seakan kontraproduktif dengan cita-cita dan semangat negara demokrasi dan semangat reformasi (Triono, 2023).

Peneliti senior CSIS J. Cristiadi menyebutkan bahwa adu gagasan harus dikedepankan oleh semua pemangku kepentingan. Alasannya, karena adu gagasan akan menyehatkan sistem demokrasi. Selain itu, adu gagasan juga meminimalisir kerawanan masifnya politik identitas di Pemilu 2024 mendatang (DKPP, 2023).

Akhir-akhir ini, narasi pemilu adu gagasan dan program kerja mulai terlihat, meskipun belum masif semasif narasi politik identitas. Bakal calon presiden yang diusung tiga partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan mengusung tema perubahan. Gagasan perubahan didengungkan karena menurutnya banyak aspek yang perlu diperbaiki dan diubah. Sementara, bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan PSI yakni Ganjar Pranowo masih mengusung gagasan keberlangsungan atas capaian dan program kerja Presiden Jokowi. Salah satu narasi yang menarik terkait adu gagasan ini terlihat dari salah satu program

pemindahan ibu kota negara. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Selatan. Dua bacalon presiden, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo telah memutuskan untuk meneruskan pembangunan IKN. Sementara, banyak pihak masih meragukan, apakah Bacalon Presiden Anies Baswedan akan melanjutkan program IKN atau justru meniadakan. Meskipun, proyek IKN berstatus hukum dengan terbitnya Undang-Undang tentang IKN. Soedjiwo Tedjo menanyakan hal itu secara langsung kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak secara tegas merespons melanjutkan atau tidak melanjutkan meskipun sudah ada payung hukum Undang-Undang. Sebab UU selalu bisa direvisi, misal dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

B. Latihan

Mahasiswa dapat mengerjakan soal latihan secara individu maupun berkelompok.

1. Jelaskan pemahaman Anda tentang politik adu gagasan!
2. Apa alasannya, mengapa politik adu gagasan penting untuk dimasifkan pada Pemilu 2024 mendatang?
3. Siapa saja yang mengharapkan adanya politik adu gagasan?
4. Apakah memainkan isu sara dalam politik identitas selaras dengan nilai-nilai Pancasila? Sebutkan alasannya!
5. Berikan salah satu contoh adu gagasan berdasarkan uraian di atas!

ProofRead
SB

ProofRead
SB

Bab 5

BAHAYANYA POLITIK IDENTITAS

A. Uraian

Program siaran “Catatan Demokrasi” yang tayang di TVOne pada Selasa, 9 Mei 2023, membahas tentang “Uji Netralitas vs Politik Identitas” menghadirkan banyak narasumber dari berbagai pihak. Kubu Anies berhadapan dengan Kubu Ganjar/Jokowi, serta pengamat sosial media. Perdebatan panas tatkala Kubu Ganjar meyakini adanya politik identitas yang melekat pada kubu Anies. Sementara, Kubu Anies manyangkal anggapan demikian. Menurut mereka, tidak ada bukti bahwa Anies menggunakan politik identitas selama menjabat gubernur DKI Jakarta. Kedua kelompok ini saling adu argumentasi. Masing-masing menguatkan pendapatnya.

Kubu Ganjar, Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa Politik identitas itu natural. Berbahaya, ketika politik SARA menjadi entitas sebagai alat menyerang orang lain. Hal tersebut terjadi sejak tahun 2012, 2014, 2017 saat Pilkada DKI Jakarta. Saat itu, terutama pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies tidak merespons atau justru membiarkan pelarangan salat jenazah bagi pendukung Ahok. Sementara itu, pegiat media sosial, Eko Kuntadi memilih diksi politisasi identitas. Politisasi identitas berbahaya. Eko Kuntadi mengambil contoh imbas dari eksplorasi Almaidah ayat 51 ternyata digaungkan dalam kontestasi pemilihan ketua OSIS Sekolah Menengah Pertama. Sebab, narasi negatif yang dikonstruksikan ialah orang yang tidak se-frekuensi dalam

pilihan politik, maka dianggap kafir, munafik, dan lain-lain. Menurutnya, selain adanya sikap pembiaran, indikasi pemakaian politik identitas kala itu ialah saat Anies berpidato usai pelantikan sebagai Gubernur. Lantas, Anies memakai istilah ‘pribumi’ dan ‘non-pribumi’.

Sementara itu, kubu Anies menyangkal bahwa anggapan penggunaan politik identitas tidak dibuktikan saat Anies menjadi gubernur. Pihaknya menilai bahwa tidak ada satupun kebijakan yang menunjukkan adanya politik identitas.

Selanjutnya, terkait bahaya politik identitas juga disampaikan oleh Anggota KPU RI Periode 2022–2027 Muchammad Afifudin. Menurutnya, munculnya atau digunakannya politik identitas telah memecah belah masyarakat. Apalagi, menurutnya hal itu juga dikemas dalam berita hoaks dan ujaran kebencian yang menyebabkan masyarakat tidak percaya dan saling membenci. Peristiwa tersebut tentunya akan mengancam keutuhan NKRI. Ia pun menekankan bahwa kompetisi dalam kontestasi pemilu adalah keniscayaan. Tetapi, upaya dalam kompetisi dengan menghadirkan dampak negatif berupa tindakan dan sikap memecah belah harus dihindari. “Bersaing oke, memecah belah jangan,” ujar Affifuddin dalam *Banner* di beranda akun Instagram milik Majalah Aula Jawa Timur, Jumat, 12 Mei 2023.

Selanjutnya, Afifudin berharap agar kompetisi meraih kekuasaan dapat dilakukan secara *fair*. Semua pihak berharap memedomani aturan yang berlaku. Sehingga, kontestasi Pemilu 2024 mendatang tidak hanya sebagai ajang pesta demokrasi, tetapi juga ajang menyatukan bangsa. Sebagaimana dalam kutipannya berikut:

“Mari kita jadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Berkompeticilah secara *fair* dengan berpedoman pada aturan main yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan”.

B. Latihan

Mahasiswa dapat mengerjakan soal latihan secara individu maupun berkelompok.

1. Sebutkan dan jelaskan potensi baha penggunaan politik identitas dalam gelaran pemilu!
2. Apa yang mengindikasikan adanya penggunaan politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta 2017?
3. Mungkinkah politik identitas tidak ada pada gelar Pemilu 2024?
4. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan agar tidak muncul narasi politik identitas?

ProofRead
SB

ProofRead
SB

Bab 6

MODERASI BERAGAMA DI PTKI: ALTERNATIF MENGHINDARI POLITIK IDENTAS

A. Uraian

Menyoal moderasi beragama, Babun Soeharto menjelaskan bahwa nilai tersebut telah diajarkan dalam Islam. Ia mencontohkan adanya perpindahan arah kiblat yang semula mengarah ke Masjidil Aqsa, menjadi mengarah ke Masjidil Haram sebagaimana tersebut dalam QS. al-Baqarah ayat 143. Hal ini berbeda dengan agama samawi terdahulu, yang masih condong wilayah Palestina sebagai pusat kota suci. Menurut Soeharto hal itu bagian dari pembuktian bahwa umat Islam adalah *ummatan washatan*, yaitu umat yang serasi dan seimbang, karena mampu memadukan dua kutub agama terdahulu, yaitu Yahudi yang terlalu membumi, dan Nashrasi yang terlalu melangit.

Menelaah dari perspektif terminologi, bahwa moderasi yang lebih dekat dengan istilah *washathiyah*, berasal dari kata *washath*, bagian tengah dari kedua ujung. Sementara moderasi, dengan kata dasar moderat, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti bahwa adanya kecenderungan pada titik tengah di antara dua buah kutub ekstrem.

Menurut Babun Suharto, *washathiyyah* merupakan metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari sikap tawazun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dapat dianalisis dan dibandingkan. Lalu, muncul sikap yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.³

Sebagai pendahuluan, saya ingin mengungkap satu contoh yang berkaitan dengan sikap moderat yang termaktub dalam Al-Qur'an, yakni soal perpindahan arah kiblat yang asalnya menghadap Masjidil Aqsha yang ada di Palestina, kemudian berpindah menjadi menghadap Masjidil Haram yang ada di Makkah.

Kemandirian dan kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, tidak terpengaruh oleh agama terdahulu yang mengagungkan Masjidil Aqsha. Dengan tegas hal ini diungkapkan oleh Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 143: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu".

Dari contoh kasus di atas, bisa kita katakan bahwa moderasi adalah jalan pertengahan, dan ini sesuai dengan inti ajaran Islam yang sejalan dengan fitrah manusia. Dengan demikian, umat Islam kemudian disebut sebagai *ummatan washathan*, umat yang serasi dan seimbang, karena mampu memadukan dua kutub agama terdahulu, yaitu Yahudi yang terlalu membumi, dan Nashrani yang terlalu melangit.

Profil BB Jika kita kaji dalam perspektif bahasa, moderat sama pengertiannya dengan *al-washatiyyah*—sebagaimana diungkapkan dalam ayat di atas. *Wasath* dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai sesuatu bagian tengah dari kedua ujung. Sedangkan

³ Babun Suharto, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*, (LkiS: Yogyakarta, 2019)., hal. 383-397.

moderat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkecenderungan (berada) di titik tengah di antara dua buah kutub ekstrem.

Al-Washatiyyah didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dibandingkan dan dianalisis, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.

Menurut Ibnu Faris, sebagaimana dikutip oleh Muchlis M. Hanafi (2009), bahwa *al-washatiyyah* berasal dari kata *wasath* yang memiliki makna adil, baik, tengah, dan seimbang. Kata ini sejalan dengan matan hadis berikut: "Sebaik-baik urusan adalah *awsathuhu* (yang pertengahan)", karena yang berada di tengah akan terlindungi dari cela atau aib (cacat) yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir.

Menurut pakar tafsir Abu Su'ud, bahwa kata *wasath* pada mulanya menunjuk pada sesuatu yang menjadi titik temu semua sisi seperti pusat lingkaran (tengah). Kemudian berkembang maknanya menjadi sifat-sifat terpuji yang dimiliki manusia karena sifat-sifat tersebut merupakan tengah dari sifat-sifat tercela. Seperti sifat dermawan adalah pertengahan antara kikir dan boros.

Di antara karakteristik ajaran Islam adalah *al-washatiyyah* (moderat) atau *tawazun* (keseimbangan), yakni keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan. Contoh dua arah yang bertentangan seperti spiritualisme dengan materialisme, individu dengan kolektif, konstektual dengan idealisme, dan konsisten dengan perubahan (Yusuf Qardhawi, 1995).

Quraish Shihab dalam *Membumikan Al-Qur'an Jilid II*, mengungkapkan bahwa eksistensi umat Islam dalam posisi moderat akan membawa mereka tidak hanyut seperti yang dialami oleh para

penganut materialisme, dan tidak pula terlena di alam ruhani seperti penganut “spiritualisme”, yang keberadaannya sering kali tidak lagi berpijak di bumi, melainkan memadukan keduanya dalam segala aspek kehidupan.

Moderasi Islam ini tercermin dalam bidang akidah, misalnya ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara mereka yang tunduk pada *khurafat* dan mitos, dan mereka yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Selain mengajak beriman kepada yang gaib, Islam pun mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional.

Dalam konteks ibadah, Islam juga mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas, misalnya salat lima kali dalam sehari, puasa sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur hidup.

Dalam konteks akhlak, ajaran Islam mengakui dan memfasilitasi adanya unsur jasad dan ruh pada diri manusia. Dengan demikian, manusia didorong untuk selalu menikmati kesenangan dan keindahan yang dikeluarkan oleh bumi, sementara unsur ruh mendorongnya untuk menggapai petunjuk langit.

Dalam Al-Qur'an ditegaskan, “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qashash [28]:77).

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa moderasi Islam memiliki dua ciri; *Pertama*, adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban. *Kedua*, adanya keseimbangan antara kehidupan dunawi dan ukhrawi, serta material dan spiritual. Sehingga peradaban dan kemajuan yang dicapai oleh umat Islam tidak semu dan fatamorgana, tetapi

hakiki dan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, yakni mewujudkan kebaikan di dunia dan di akhirat (Tarmizi Taher, 2007).

Aspek ajaran Islam yang serba moderat ini mengandung unsur *rabbaniyah* dan *insaniyah*. Yang pertama berarti ajarannya benar-benar berasal dari Allah, Tuhan pemelihara alam, bukan dari manusia. Sedangkan yang kedua mengandung arti bahwa tuntunan tersebut ditujukan kepada manusia, oleh karena itu bimbingannya selaras dengan fitrah manusia. Menurut Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Agama, Suwendi (10/1/2018), mengungkapkan bahwa untuk melakukan moderasi Islam dalam memahami moderasi Islam, setidaknya terdapat dua indikator. *Pertama*, jika pemahaman keagamaannya linier dengan ideologi kebangsaan, seperti perjuangan para santri yang digelorakan oleh *Hadratussyekh* KH Hasyim Asy'ari melalui fatwa resolusi jihadnya pada 22 Oktober 1945 untuk mengusir penjajah. *Kedua*, mendudukkan fungsi agama sesuai dengan dosisnya. Agama diciptakan Allah untuk manusia dan untuk memberikan kedamaian bagi manusia. Kemuliaan Allah sendiri tidak akan turun karena perbuatan manusia.

Konsep moderasi Islam adalah salah satu katup pengaman atau salah satu pilar yang paling kokoh di dalam keharmonisan sosial berbangsa. Moderasi Islam ini muncul dari kekhawatiran umat yang merasakan bahwa pandangan yang ekstrem menjadi pandangan yang kuat dan dianut oleh masyarakat, maka pandangan itu bisa menyebabkan keretakan sosial.

Manusia adalah makhluk yang dianugerahi oleh Allah SWT potensi untuk terus berkembang. Konsekuensinya, manusia akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Di sisi lain, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah telah sempurna, dalam arti tidak akan ada penambahan ayat dan hadis yang baru.

Berdasarkan hal inilah para ulama kemudian membagi ajaran Islam ada dua macam, yaitu ajaran Islam yang berisikan ketentuan-ketentuan yang *tsawabit* (tetap), dan hal-hal yang dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu (*mutaghayyirat*). Yang termasuk *tsawabit* antara lain prinsip-prinsip akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Selebihnya *mutaghayyirat* yang bersifat elastis/ fleksibel (*murunah*) dan dimungkinkan untuk dipahami sesuai perkembangan zaman.

Tercatat dalam sejarah Islam banyak fatwa yang berbeda karena disebabkan oleh realitas kehidupan masyarakat yang juga berbeda. Sebagai contoh, Umar bin Khatthab RA., adalah tokoh yang banyak disebut karena kecerdasan beliau dalam memahami realitas untuk kemudian dijadikan alasan untuk memutuskan satu perkara, yang secara lahiriyah terkadang tampak seperti tidak sesuai dengan bunyi teks ayat Al-Qur'an maupun hadis.

Tokoh lain, misalnya Imam 'Asy-Syafi'i (w. 204 H), yang sangat populer dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Di era modern banyak kita jumpai, karena realitas kehidupan masyarakat yang berbeda maka melahirkan fatwa yang juga berbeda dalam rangka untuk mengambil pandangan yang berbeda dengan apa yang selama ini.

Contoh konkret konteks keindonesiaan adalah bagaimana menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Sementara pandangan akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjawab pertanyaan tersebut di antaranya adalah surah al-Maidah: 44, 45, 47.

Profil Sosial... Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" (al-Maidah: 44).

"... Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim" (al-Maidah: 45).

“... Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik” (al-Maidah: 47).

Dari ketiga ayat di atas, ada sebagian kelompok yang memahami bahwa menerapkan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan termasuk bernegara adalah harga mati, maka bagi seseorang/kelompok/negara yang tidak menerapkan hukum Allah dapatlah dinilai sebagai kafir, zalim, dan fasik. Pandangan ekstrem tersebut akan sulit diterapkan dan diamalkan dalam konteks keindonesiaan. Kesimpulan tersebut sangat tidak realistik karena tidak memahami realitas negara Indonesia yang majemuk dalam segala hal, salah satunya soal kemajemukan dalam beragama.

Para ulama secara umum berpendapat bahwa masalah hukum (*syari'ah-fiqh*) merupakan persoalan furu' (cabang), bukan masalah ushul/pokok. Jika perbedaan pendapat dalam masalah furu' menghasilkan penilaian benar atau salah, maka dalam masalah ushul (akidah) dapat menjadikan seseorang terjerumus pada kekafiran. Dari prinsip ini dapat dikatakan bahwa seseorang yang tidak menjalankan hukum Islam karena melanggar bukan karena pengingkaran dan penentangan, maka tidak dapat dinilai sebagai kafir. Dalam konteks ini harus dibedakan antara pelanggaran dan penentangan; Pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah akan mengakibatkan dosa/fasik, sedangkan penentangan terhadap hukum-hukum Allah dapat mengakibatkan kekafiran.

Dalam konteks negara-negara yang tidak menjadikan agama Islam sebagai dasar bernegara secara resmi dan formal seperti Indonesia tidak dapat dinilai sebagai negara kafir, karena sistem yang dijalankan tidak membatasi dan bertentangan dengan ajaran Islam yang bersifat ushul. Seandainya terlihat seperti ada pelanggaran, maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan dosa/fasik.

Menurut Fahmi Huwaidi, paling tidak ada dua alasan mengapa realitas penerapan suatu hukum selain syariat Allah bukanlah suatu

bentuk kekufuran. *Pertama*, agama tidak menganggap “pelanggaran” terhadap hukum Allah sebagai bentuk kekufuran. Oleh karenanya, tidak aneh ketika banyak khalifah di masa-masa awal Islam, di mana para sahabat dan Tabi'in masih hidup, memaksa rakyat untuk membaiat putra-putra mahkota mereka, yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum syura yang ditetapkan Allah. *Kedua*, menerapkan hukum selain hukum Allah seperti telah disinggung di atas bukanlah persoalan akidah dan keimanan, maka bagi yang belum melaksanakan bukanlah dinilai kafu' melainkan fasik/dosa.

Kelompok mana pun yang ingin memperjuangkan penerapan syariat Islam itu boleh dan sah saja, sepanjang mempertimbangkan kondisi *real* masyarakat Indonesia yang memang majemuk, termasuk dalam memahami ajaran Islam dan tidak memaksakan kehendak pula anarkis. Kaum muslimin Indonesia pada awalnya menerima ajaran Islam yang diajarkan oleh para pendakwah, yang dikenal dengan *wali songo*, yang menggunakan pendekatan kultural untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dengan pendekatan itulah akhirnya Islam diterima secara masif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang moderat karena sesuai dengan realitas masyarakat saat itu.

Keragaman itu akan tetap berlaku sepanjang masa. Tidak dapat dibayangkan bahwa manusia adalah satu dalam segala halnya. Kalau ada usaha untuk menyeragamkan manusia itu berarti melawan ketentuan Allah Swt. Karena sifatnya yang abadi, maka keragaman dan kemajemukan tersebut adalah sebuah realitas yang dapat dijadikan pedoman dan landasan tindakan manusia dalam menjalani hidup dan menghadapi persoalan-persoalan hidup.

Indonesia merupakan karunia Allah Swt yang istimewa. Tidak ada negara dengan kompleksitas seperti Indonesia dengan beragam budaya dan agama, namun bisa hidup damai. Islam di Indonesia mayoritas sampai 88 persen, tapi kita tidak melihat dominasi mayoritas terhadap minoritas.

Moderasi Islam di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan harus ditingkatkan sebagai bentuk penangkalan terhadap paham radikalisme fundamentalis. Fenomena radikalisme fundamentalis literalis tampak pada kalangan umat Islam yang bersikap ekstrem dalam memahami hukum-hukum agama, dan mencoba memaksakan cara tersebut dengan menggunakan kekerasan di tengah masyarakat Muslim.

Menurut Romli Syarqawi, Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional Cabang Indonesia, yang dirilis *republika.co.id.*, (2/9/2015) bahwa corak penafsiran agama radikal-fundamental ditandai oleh empat hal:

Pertama, sikap tidak toleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Umat Islam walaupun dituntut untuk meyakini ajaran Islam, konsisten dan berpegang teguh dengannya, namun dalam saat yang sama Islam mengajarkan sikap toleran sebagaimana termaktub isyaratnya dalam Surah al- Kafirun.

Kedua, fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Sifat ini bila menghiasi diri seseorang dalam agama dan keyakinannya dapat dibenarkan bahkan terpuji, tetapi ia menjadi tercela jika sikapnya itu mengundangnya melecehkan orang lain.

Ketiga, eksklusif, yaitu membedakan diri dari umat Islam pada umumnya.

Keempat, bersikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan, serta sikap memahami teks keagamaan secara teksual dan parsial dan mengabaikan nilai-nilai modernitas Islam. Sebagai contoh adalah memahami pengertian jihad; kalau dilakukan secara parsial maka akan menghasilkan kesimpulan yang keliru tentang jihad.

Wajah Islam yang ramah dan moderat akan tampak garang dan ekstrem. Dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh

akan dapat disimpulkan, bahwa kata jihad dalam Al-Qur'an tidak selalu berkonotasi perang bersenjata melawan musuh, tetapi dapat bermakna jihad melawan hawa nafsu dan setan. Ajaran Al-Qur'an akan tampak sebagai sebuah *rahmatan lil alamin*, berwatak toleran dan damai bila dicermati semangat umum ayat-ayatnya. Sebaliknya bila ayat-ayat *qital* (perang) yang diperhatikan, terlepas dari konteks dan kaitannya dengan ayat-ayat lain, maka Al-Qur'an akan terkesan sebagai ajaran keras, kejam, dan tidak toleran.

Dalam rangka menghadang efek negatif tersebut, perlu ditegaskan dan diteguhkan kembali paham moderat yang mampu merangkul dan menerima setiap sisi kehidupan keberagamaan. Konsep moderat (*washatiyah*) dalam hal ini bisa diartikan sebagai keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya; "kiri" dan "kanan", berlebihan (*ghulu*) dan keacuhan (*taqshir*), literal dan liberal, serta sejenisnya.

Moderasi Islam dapat diimplementasikan PTKIN dengan mengembangkan pendidikan multikultural di setiap lembaganya masing-masing. Pendidikan multikultural ini memberi dorongan dan spirit bagi institusi pendidikan Islam untuk mengakumulasikan konsep pendidikan multikultural, yang diharapkan mampu mengakomodir problematika yang berorientasi pada pendidikan, agama, dan budaya.

Selain itu, peran institusi pendidikan dalam hal ini adalah untuk mau menanamkan sikap kepada mahasiswa untuk menghargai individu, masyarakat, agama, dan keyakinan yang lain dalam setiap komunitas. Harapannya adalah, dengan implementasi pendidikan Islam yang berwawasan multikultural akan membantu mahasiswa dalam memahami, mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, agama, nilai dan kepribadiannya. Melalui penanaman semangat multikulturalisme di kampus, akan menjadi perantara pelatihan dan penyadaran bagi generasi penerus untuk dapat menerima perbedaan, keberagaman ras, budaya, keyakinan,

agama, dan etnis. Pendidikan multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut pasal itu, dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Tujuan utama pendidikan multikultural adalah menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidaktoleran seperti inkuisi, perang, agama, diskriminasi dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam tangan yang kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi, dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat bias dengan negara adidaya, yaitu Amerika, karena pendidikan multikultural memiliki akar sejarah dengan gerakan Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut.

Banyak uraian sejarah ataupun asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial orang Amerika keturunan Afrika, dan kelompok kulit warna lain yang mengalami praktik diskriminasi di lembaga-lembaga publik. Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga pendidikan. Sekitar tahun 1960-1970-an, suara-suara yang menuntut agar lembaga pendidikan lebih konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin kencang. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan multikultural.

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalannya mulai melebarkan sayapnya pada kelompok kawasan yang secara khusus memiliki keragaman etnis, ras, agama, dan budaya, seperti halnya Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik.

Dalam konteks keindonesiaan, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum setelah runtuhan rezim yang diasumsikan dengan otoriter-militeristik Orde Baru, karena hembusan badai reformasi yang dimotori oleh mahasiswa. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa, namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasakan perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultural untuk menangkal semangat primordialisme tersebut.

Seperti yang dikutip Zubaedi dari James A. Banks, tujuan pendidikan multikultural adalah sebagai berikut:

“The goal of multicultural education for freedom, multicultural education should help student to develop the knowledge, attitude, and skills to participate in a democratic and free society... Multicultural education promotes the freedom, abilities and skills to cross ethnic and cultural boundaries to participation in other cultures and group.”

Artinya:

Tujuan pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan. Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang bebas dan demokratis. Pendidikan multikultural mengembangkan kebebasan, kemampuan, dan keterampilan dalam menerobos batas-batas budaya

serta etnis agar dapat berpartisipasi dengan kebudayan dan kelompok lain.”

Jika dijabarkan lebih detail, pendidikan multikultural paling tidak memiliki lima tujuan. *Pertama*, meningkatkan pemahaman diri dan konsep diri secara baik. *Kedua*, meningkatkan kepekaan dalam memahami orang lain, termasuk terhadap berbagai kelompok budaya di negaranya sendiri dan negara lain. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami kemajemukan, interpretasi kebangsaan dan budaya yang kadang-kadang bertentangan, menyangkut sebuah peristiwa, nilai dan perilaku. *Keempat*, membuka pikiran ketika merespons isu. *Kelima*, memahami latar belakang munculnya pandangan klise atau kuno, menjauhi pandangan stereotip dan mau menghargai semua orang.

Sedangkan, menurut Ainul Yaqin, pendidikan multikultural memiliki dua tujuan, yakni tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya dapat dicapai dengan baik.

Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan maupun mahasiswa umum.

Adapun tujuan akhir pendidikan multikultural adalah pembelajar tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi ajar yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa para pembelajar akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis.

Singkatnya, paradigma pendidikan multikultural diharapkan mampu menghapus stereotip, sikap dan pandangan egoistik, individualistik dan eksklusif di kalangan mahasiswa. Sebaliknya, dia senantiasa dikondisikan ke arah tumbuhnya pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau

terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas, etnisitas, rasis, agama, dan budaya.

Sementara itu, pendidikan Islam yang selama ini identik dengan pendidikan agama paling tidak diharapkan akan mampu mengakumulasikan nilai-nilai agama baik yang bersifat tekstual ataupun faktual. Dengan demikian, rasa toleransi akan mulai tertata dalam sisi benak mereka sehingga akan menimbulkan efek positif dan cita-cita dan tujuan pendidikan multikultural akan kita petik hasilnya.

Dalam imlementasinya, pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
2. Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
3. Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda.
4. Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan skeptis tentang ras, budaya, dan agama.
5. Menyiapkan kurikulum pendidikan agama yang harus bisa memberikan jaminan bagi terselenggaranya dialog, dengan menyajikan berbagai kearifan masing-masing ajaran dan pengalaman religius setiap individu.

*ProofRead
SD* Sedangkan implementasinya dalam pendidikan Islam, pendidikan multikultural paling tidak harus mampu mengintegrasikan antara nilai-nilai agama, budaya, pendidikan (Islam dan umum). Selain mengintegrasikan nilai-nilai, juga diharapkan mampu memberikan solusi terhadap problem yang selama ini

menyelubungi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, paling tidak pendidikan multikultural, bisa menjadi mediator dalam merangkul kedua sistem pendidikan yang berbeda itu.

Moderasi beragama di Indonesia dinilai perlu diwujudkan oleh semua kalangan, mengingat banyak sekali dampak buruk disebabkan oleh pemahaman agama yang keliru, terutama pemahaman ajaran Islam garis keras.⁴ Radikalisme yang berkembang di Indonesia tidak hanya menyusupi masyarakat secara langsung, kaum fundamentalis di Indonesia memanfaatkan sistem bernegara untuk mewujudkan kepentingan politiknya seperti menciptakan politik identitas. Hal itu menjadi kekuatan tersendiri agar dinamika politik di Indonesia terus memanas, puncaknya pergantian sistem dari demokrasi menjadi sistem yang berasas selain Pancasila dan UUD 45 bisa terlaksana.

Pernyataan tersebut terungkap saat kegiatan Talk Show Kebangsaan yang diselenggarakan Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kebijakan dan Pembangunan (Elkap) Purwakarta, di Menteng Food Zone, di Ciseureh Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (27/7). Kegiatan diskusi yang mengangkat tema terkait dinamika pemilu dan kebangsaan di Indonesia tersebut turut dihadiri Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Ahmad Ikhsan Faturrahman, Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purwakarta, KH Ahfaz Fauzi Asyiqien, dan Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) KHEZ Muttaqien, Ramlan Maulana, serta ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Purwakarta.

Akademisi STAI KHEZ Muttaqien, Ramlan Maulana mengatakan, Indonesia merupakan negara yang mampu mengelola konfliknya sendiri sehingga pengamalan ajaran Islam yang moderat sangat tepat diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Menurut tokoh muda NU Purwakarta ini, Pemilu 2019 kemarin semua elemen bangsa

⁴ Abdul Rahman Ahdori, "Moderasi Beragama Diperlukan Agar Politik Identitas Tidak Muncul", <https://www.nu.or.id/nasional/moderasi-beragama-diperlukan-agar-politik-identitas-tidak-muncul-YUM4u>. Diakses pada 05 Oktober 2023, Pukul. 19:58 WIB.

dihadapkan dengan masalah agama yang sengaja diciptakan oleh kelompok Islam tertentu. Kelompok Islam Populis tersebut ingin memanfaatkan agama untuk merengkuh kepentingan politik.

“Misalnya kita sudah saksikan pada rangkaian Pemilu 2019 kemarin, KPU diterpa hoaks, bahwa KPU sebagai tangan panjang dari rezim. KPU setiap daerah juga dikatakan sudah berpihak kepada pemerintah, termasuk KPU saat mengumumkan hasil pleno dikatakan melakukan kecurangan dengan mencuri waktu,” katanya.

Magister Humaniora ini menilai, kelompok Islam populis tersebut menyerang seluruh lembaga negara karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran islam yang mereka anut. Untuk itu, sangat diwajarkan jika terjadi benturan ideologi antara kelompok Islam moderat dan kelompok Islam radikal.

“Untuk menghadapi persoalan tersebut, kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi pemilu hari ini dijadikan pembelajaran untuk masyarakat, menjadi penerang dan bukan menjadi penyebar hoaks,” ucapnya.

Pascaputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) satu bulan yang lalu menjadi putusan final dan mengikat. Sehingga, semua elemen bangsa harus kembali merajut persatuan dan kesatuan agar kerukunan kembali tercipta. Sementara itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Ahmad Ikhsan Faturrahman menungkapkan, persatuan dan kesatuan telah dilakukan oleh para pendiri bangsa ratusan tahun yang lalu. Pada persatuan itu kemudian lahirlah sebuah falsafah bangsa yang dijadikan rujukan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila.

Untuk itu, menurut aktivis Muhammadiyah yang juga Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta itu, setelah putusan MK seharusnya dinamika politik yang menghancurkan persatuan anak bangsa terhenti. Apalagi perdebatan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik, sudah wajib hilang.

“Dan hilanglah semua primordialis yang terkapling-kapling. Berbicara mengenai bangsa yang besar, maka kita harusnya fokus dan saatnya berpikir di era *golden power* untuk tidak mudah terkontaminasi oleh isu-isu hoaks,” tuturnya.

Menurut dia, segala ketentuan sifatnya mutlak yaitu tidak ada lagi pertarungan atau perpecahan antar-kubu pasangan calon. Dengan memikirkan, bagaimana anak muda dapat mewujudkan cita-cita negara Indonesia supaya menjadi bangsa yang besar.

“Merajut persatuan dan kesatuan adalah suatu hal yang utama agar tidak terjadi pepecahan. Kita lepaskan semua perbedaan karena berbeda bukan berarti harus terpecah belah. Kita sebagai anak muda juga harus bisa memfilter tentang sesuatu yang sifatnya mengarah ke persatuan ataupun perpecahan,” pungkasnya.

ProofRead
SB

ProofRead
SB

Bab 7

MATA KULIAH KEBANGSAAN DI PTKI

A. Uraian

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan sangat pesat, masuknya budaya-budaya asing melalui berbagai media elektronik maupun cetak telah menimbulkan pergeseran-pergeseran nilai budaya maupun nilai-nilai fundamental yang berasal dari ajaran agama.

Kemajuan dalam berbagai bidang ini menuntut bangsa Indonesia untuk mengimbangi perubahan dengan cara mengadakan seleksi dan saringan terhadap budaya asing yang masuk, yang sekiranya dapat memberikan dampak negatif dalam mengubah tatanan dan budaya bangsa Indonesia. Semakin cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam era globalisasi ini menuntut peranan agama secara aktif sebagai alternatif dan filter terhadap masalah tersebut.

Kelanjutan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang sangat tergantung pada sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Ketika bangsa Indonesia menitipkan masa depan bangsanya kepada generasi muda, maka sudah selayaknya generasi muda itu dipersiapkan dan mempersiapkan dirinya sejak dini dengan penguasaan sains dan teknologi yang berakhlakul

karimah sehingga dengan demikian diharapkan generasi masa depan menjadi generasi yang tangguh.

Untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas itu, diperlukan suatu proses yang dapat menunjang ke arah pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang utuh dalam pengertian manusia Indonesia yang memiliki identitas kejuungan yang kuat, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Salah satu proses pembentukan sumber daya manusia itu adalah melalui pendidikan agama di perguruan tinggi.

Pada dasarnya, proses pendidikan agama di perguruan tinggi negeri maupun swasta tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional yang telah digariskan. Sistem pendidikan nasional kita mengharapkan bahwa setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia didasari dengan asas Ketuhanan yang menghasilkan manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sistem pendidikan inilah maka tujuan pendidikan nasional dapat dicapai.

Untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut, maka kita harus mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan itu telah dicapai saat ini. Penggunaan konsep-konsep pendidikan Barat yang masih banyak mewarnai sistem pendidikan kita mau tidak mau harus dievaluasi kembali. Sekularisasi ilmu pengetahuan secara umum dan sekularisasi ilmu-ilmu agama dapat menghambat pencapaian tujuan pembentukan manusia Indonesia yang utuh. Konsep-konsep moral dan budaya asing dalam era globalisasi ini dapat menjadi penyebab mudahnya terjadi benturan nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai keagamaan yang berdampak negatif terhadap masa depan pembangunan nasional.

Alvin Toffler dalam bukunya *The Third Wave* menjelaskan perubahan umat manusia dari gelombang peradaban pertama, kedua, dan ketiga dengan menganalisis empat sistem yang saling berkaitan, yaitu *techno-sphere* (lingkungan teknologi yang meliputi

sistem energi, produksi, dan distribusi barang), *info-sphere* (lingkungan informasi yang merupakan sistem saluran informasi untuk mendistribusikan pesan-pesan individu, kelompok, atau organisasi), *socio-sphere* (sistem sosial yang menentukan peranan individu dalam hubungannya dengan sesama), dan *psycho-sphere* (suasana kejiwaan, keadaan ruhaniah yang meliputi seluruh anggota masyarakat). Keempat sistem itu ternyata telah membentuk, mempengaruhi, dan menentukan dinamika masyarakat manusia. Bahkan Toffler menyatakan bahwa pada saat ini kita sedang mengalami hancurnya *techno-sphere*, *info-sphere*, dan *socio-sphere*, juga hancurnya *psycho-sphere* (1981: 365).

Pada saat kita menghadapi perkembangan peradaban dan budaya modern yang disertai arus infomasi yang semakin cepat, ternyata paham pragmatisme telah meredisposisi manusia untuk melaksanakan peran yang bertitik tolak dan terkonsentrasi pada kepentingan manusia. Peran manusia sebagai sentral dan fungsional itu telah menjadikan manusia yang berpandangan humanis sebagai penentu kebenaran dan menolak konsep Kemahakuasaan Tuhan. Kemampuan manusia untuk berpikir reflektif dan menanti kesimpulan tertentu telah mendorongnya untuk menyatakan bahwa kebenaran merupakan hasil pengalaman dan kebenaran atas dasar peristiwa. Paham yang demikian tersebut, pada saat ini merupakan hal yang faktual terjadi di kalangan kehidupan masyarakat kita, terutama pada civitas akademika (di antaranya mahasiswa) di dunia Perguruan Tinggi Umum (PTU). Bahkan akhirnya menerobos masuk ke dalam pranata sistem pendidikan kita, disadari atau tidak.

Konsekuensi logis dari hal itu, terjadinya gerakan dari peserta didik (sebagian besar kalangan mahasiswa) yang menekankan bahwa ia belajar apabila mata kuliah itu bermakna dalam kehidupannya (dapat memberikan kontribusi secara material). Dengan pengertian bahwa hal tersebut dapat menunjang dalam pencarian material selanjutnya dan masa depannya.

Berkaitan dengan agama, maka agama dipandang sebagai hasrat manusia untuk menemukan alat-alat yang cocok yang dapat menghasilkan akibat-akibat materi yang diinginkan. Agama merupakan alat religiusitas manusia. Sehingga dengan demikian, mereka menolak adanya ketentuan agama yang mutlak benar yang bersumber dari Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa yang mengatur kehidupan alam semesta. Agama merupakan gagasan dan gagasan merupakan alat, alat yang selalu harus diperbaiki dan bersandar dari pengalaman manusia. Akhirnya kebenaran atas nama agama merupakan hal yang relatif dan individual.

Di samping itu, dunia pendidikan kita saat ini selain telah membentuk pandangan manusia tentang kebenaran relatif, juga telah melahirkan metodologi ilmiah untuk pengembangan ilmu dan teknologi serta metode pengajaran yang melahirkan paradigma *cost-benefit*.

Hal tersebut telah menunjukkan kepada kita tentang bagaimana paham-paham materialisme dan pragmatisme. Kedua paham itu telah menanamkan cara hidup tertentu yang pada akhirnya menolak keberadaan agama sebagai *way of life* dan satu-satunya sumber kebenaran. Sebagaimana yang dikemukakan Gordon W. Allaport yang menyatakan bahwa cara manusia beragama ada dua, yaitu cara beragama ekstrinsik dan intrinsik. Cara beragama ekstrinsik mengajarkan bahwa agama dipandang sebagai *something to use but not to life*. Agama hanya dipandang sebagai simbolitas dan status yang digunakan untuk memberikan legitimasi bagi individu atau kelompok manusia. Cara beragama seperti ini telah menempatkan agama dalam posisi yang marginal dan impoten dalam pengaturan kehidupan manusia. Atau dengan kata lain, pemahaman agama sebatas pada kognisi manusia tanpa mempengaruhi aspek afeksi dan psikomotorisnya.

Dampak cara beragama seperti ini erat kaitannya dengan penyakit mental dan tidak akan melahirkan masyarakat yang penuh

kasih sayang, bahkan sebaliknya menumbuhkan kebencian, iri hati, dan budaya fitnah yang selalu terjadi. Adapun cara beragama intrinsik, agama dipandang sebagai *comprehensive commitment, driving integrating motive* (pengendalian hasrat dan keinginan manusia) dan *unfying factor and force* (faktor dan kekuatan pemandu) kehidupan dan perilaku, serta kepribadian manusia.

Kondisi dimana peran agama diampunsi fungsi dan peranannya, maka hal ini mendorong manusia mengambil keputusan untuk menyimpan nilai-nilai budaya bangsa dan nilai-nilai dalam telur yang tidak berjendela dan berpintu. Nilai itu terpendam sebagai suatu endapan dan bagian masa silam.

Manusia PTU (mahasiswa) menghadapi keterbauran dan kehampaan nilai sehingga sulit untuk mementukan benar dan salah. Mereka merasa masih memiliki nilai-nilai tersebut yang bersifat luhur dan suci, tetapi dalam kehidupan nyata mereka dipaksa untuk melandaskan kehidupannya dengan menerapkan nilai-nilai pragmatis yang bersifat material dan sekuler. Mereka memandang kewajiban pelaksanaan nilai keyakinan dan ibadah (agama) sebagai masalah pribadi dan individual sehingga ketika memasuki lapisan teknosstruktur digunakan nilai dan norma lain yang berbeda dengan keyakinannya. Acapkali bertentangan dan membingungkan. Manusia mulai kehilangan kepribadian yang berdasarkan keyakinan agamanya dan teralienasi terhadap norma agamanya. Manusia memiliki kepribadian yang lain (ganda), yang dibangun berdasarkan pandangan hidup pragmatis dan sekularis. Mahasiswa sedang mengalami *disturbance of self image* (keguncangan citra diri) dan *split personality* (kepribadian yang pecah).

Mahasiswa PTU merasakan kondisi tersebut. Perguruan tinggi fungsinya telah berubah menjadi mesin-mesin produksi yang setiap tahunnya menghasilkan sarjana. Seorang sarjana berharap dapat memasuki dunia dan pasar kerja yang berdampak tuntutan penghasilan tinggi. Akibatnya persaingan tidak sehat terjadi dalam

memperebutkan material, terkadang disertai pola machiavelisme dan permisivisme. Agama terlupakan dan tidak berbekas dalam kehidupan. Apa yang diperoleh dalam mata kuliah agama di PTU tidak lagi diingat, apalagi diamalkan.

Ini merupakan sekilas gambaran fenomena mahasiswa di PTU negeri atau swasta yang sedang mengalami perubahan orientasi. Dalam perwujudannya, pendidikan agama melibatkan semua pihak yang ada dalam masyarakat dan pemerintahan. Masing-masing pihak akan saling memiliki keterikatan yang tidak mungkin untuk dipisahkan dan terdapat saling ketergantungan. Dalam kaitan inilah kiranya, kita tidak dapat memungkiri terdapatnya ekses-ekses pendidikan, baik yang bersifat filosofis (idea) dan yang bersifat teknis pelaksanaan sebagai penjabaranya.

Sempalan secara bahasa memiliki makna patahan, potongan (kayu). Kata *sempalan* ini sering dikaitkan dengan kelompok atau organisasi keislaman yang memiliki ciri-ciri tertentu (khas), yang dipandang berbeda dengan hal yang lazim terdapat di dalam masyarakat. Atau kelompok atau organisasi yang berada di luar yang seharusnya (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw).

Hanya saja untuk memberikan batasan yang jelas dan tegas mana yang merupakan kelompok atau organisasi, sempalan tampaknya agak sulit. Sebab, masing-masing kelompok atau organisasi keislaman mengklaim bahwa kelompok atau organisasinya selalu merujuk kepada dua pedoman utama Islam (Al-Qur'an dan Sunnah). Begitu pula kalau satu kelompok atau organisasi dijadikan sebagai patokan yang telah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu sama artinya dengan menyatakan bahwa di luar kelompok atau organisasi itu merupakan kelompok sempalan (menyimpang). Sebagai contoh jika Nahdlatul Ulama dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai keberadaan organisasi atau kelompok yang lain, maka tentu saja dalam hal keberadaan Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam dan lain-lain,

dipandang sebagai kelompok yang menyempal. Padahal organisasi atau kelompok tersebut memiliki akidah yang sama dengan NU dan perbedaan itu terletak hanya sebatas pada pemahaman (cabang) semata. Oleh sebab itu, untuk memberikan peristilahan sempalan kepada kelompok atau organisasi yang ada dan yang berkembang dalam masyarakat (kampus), baik yang formal atau nonformal, agak kurang tepat.

Berkaitan dengan berkembangnya kegiatan keagamaan di kampus-kampus seluruh perguruan tinggi di Indonesia, maka yang terjadi seiring dengan hal itu adalah munculnya gejala pengkultusan dan ekstremitas Gejala kultus (*cult*), yaitu bentuk gerakan spiritual (dan keagamaan) dengan sistem pengorganisasian yang ketat, penuh disiplin, absolutistik, kurang toleran kepada kelompok lain. Kultus biasanya berpusat pada ketokohan seorang pribadi yang menarik, berdaya pikat retorik yang memukau, sederhana namun dengan penuh keteguhan, menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan. Contoh yang paling sering diungkapkan untuk gerakan kultus ini adalah *Unification Curch, Divine Light Mission, Hare Krishna, The Way, People's Temple, Children of God, Christian Identity*, dan lain-lain. Semua kelompok tersebut berada di Amerika Serikat yang kemudian menyebarluaskan ajaran-ajarannya ke seluruh dunia.

Adapun yang berkembang di Indonesia yang berkaitan dengan pengkultusan terdapat pada kelompok Darul Arqam, Islam Jamaah, Isa Bugis, Ahmadiyah Qadhiyani, dan lain-lain. Gerakan kelompok Ahmadiyah Qadhyani, misalnya, meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai al-Masih yang dijanjikan Tuhan. Di samping itu terdapat keyakinan bahwa kenabian itu tidak berakhir pada Nabi Muhammad Saw, tetapi masih terus berlangsung, sehingga Mirza Ghulam Ahmad dipandang sebagai nabi yang paling mulia dari semua nabi. Dalam pandangan mereka, setiap orang Islam adalah kafir sampai mereka masuk ke dalam ajaran Qadhiyani dan anggota Qadhiyani yang menikah dengan orang yang bukan

berasal dari kelompoknya dianggap kafir (Lihat Najiyyullah, Jilid 2, 1995: 302). Biasanya mereka tidak mau melakukan salat berjamaah dengan umat Islam yang lain (memisahkan diri), dan kalaupun mereka melakukan salat berjamaah, mereka harus menjadi imamnya. Pada saat ini, kelompok Ahmadiyah Qadhiyani sudah cukup lama masuk ke dalam berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dari aktivitas mereka adalah perdebatan sengit di kalangan para aktivis Muslim yang menolak ajaran tersebut, akan tetapi tidak sedikit di kalangan mahasiswa dan pelajar yang masuk ke dalam ajaran ini.

Gerakan kultus pada dasarnya merupakan gejala sosial yang hanya dapat dijelaskan jika kita melihat gejala-gejala negatif masyarakat industri, yaitu kesepian, hilangnya struktur masyarakat yang kukuh, ambruknya makna dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku. Dengan kata lain, masyarakat industri telah mengakibatkan alienasi atau keterasingan diri pribadi anggota masyarakatnya. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat kampus mengalami hal tersebut. Alienasi itulah yang menyebabkan anggota masyarakat (mahasiswa) tertarik pada kultus-kultus. Hal ini disebabkan alienasi menimbulkan rasa sepi yang mencekam, yang merindukan perkawanan yang akrab dan hangat, yang mendambakan suatu kejelasan tentang apa dan hendak ke mana hidup ini.

Di samping itu, kultus menawarkan struktur yang banyak dibutuhkan orang. Ketentuan-ketentuan yang ketat pada perilaku, disiplin yang kuat. Hal inilah yang tidak ditawarkan oleh para dosen Pendidikan Agama Islam. Sebab, dosen Pendidikan Agama Islam masih terjebak dalam menjelaskan agama hanya pada tataran yang sifatnya ibadah-ritual-transendental dengan suatu pemaparan yang mungkin dipandang monoton, membosankan, dan “gersang”, dalam arti tidak memberikan kesejukan kepada batin para mahasiswa.

Berkaitan dengan hal di atas, terdapat pula sikap ekstremitas keagamaan yang tidak begitu berbeda dengan kultus yang bercirikan faktor-faktor yang telah disebutkan, yaitu ketertutupan, pemaksaan disiplin yang keras, pasungan pada pengorbanan harta dan jiwa yang tidak proporsional, absolutisme, dan janji-janji keselamatan yang diberikan dengan tegas dan sederhana. Yang menonjol dari hal ini adalah terdapatnya gejala kefanatikan, ketertutupan, dan corak penganutan agama. Organisasi atau kelompok yang dipandang sebagai gerakan ini adalah al-Ikhwan al-Muslimin, Hizbus Salamah, Syi'ah Imamiyah, Wahabi, dan lain-lain yang kesemua itu melakukan aktivitasnya di kawasan Timur Tengah: Mesir, Libya, Libanon, Arab Saudi, Palestina, Syiria, Yaman, dan lain-lain (lihat: WAMY, 1993).

Adapun secara akidah, semua kelompok tersebut merupakan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, kecuali Syi'ah Imamiyah, yang mengacu pada sumber nilai hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Untuk Indonesia terdapat organisasi atau kelompok Darul Islam (DI/NII), Jamaah Isa Bugis, Lembaga Kerasulan, Islam Jamaah, Tarbiyah, dan lain-lain. Sebagai suatu contoh adalah kelompok gerakan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Seruan gerakan Islam ini adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta mengajak umat Islam menerapkan ajaran Islam dan syariatnya dalam kehidupan nyata.

Di antara aktivitas yang dilakukannya adalah memotivasi masyarakat untuk menyebarkan kebaikan, memerangi kemunkaran, dan kerusakan. Memerdekakan negara dengan membersihkan rakyat dari berbagai kekuasaan asing di bidang politik, ekonomi, maupun mental spiritual; dan memperbaiki pemerintahan sehingga benar-benar menjadi negara yang Islami. Aktivitas Ikhwanul Muslimin ini telah menimbulkan ketidaksukaan di kalangan pemerintah di negara-negara Arab, seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia. Akibatnya banyak di kalangan Ikhwanul Muslimin dimasukkan ke dalam penjara,

terlebih setelah peristiwa terbunuhnya Anwar Sadat di Mesir beberapa tahun yang lalu.

Contoh lain (dalam hal ini berkembang juga di Indonesia) adalah kelompok Jama'ah Tabligh. Kelompok ini berdakwah dengan berpijak pada keutamaan-keutamaan ajaran Islam. Jama'ah ini menekankan kepada setiap pengikutnya untuk meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan tidak melibatkan diri pada partai-partai dan masalah-masalah politik. Dalam kelompok ini, setiap pengikutnya diharuskan untuk membaiat (kesetiaan) kepada pimpinannya. Sebab dalam keyakinan mereka, barang siapa yang meninggal dunia sementara di atas pundaknya tidak ada baiat (sumpah setia), maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah.

Pengkultusan dan ekstremitas hanyalah pelarian manusia dalam keadaan tidak berdaya dan sesuatu yang hanya memberikan ketenangan semu. Kultus dan ekstremitas merupakan akibat dari kerjanya berbagai faktor dalam masyarakat yang sedang berubah cepat dan merupakan gejala keagamaan dan keruhanian.

Salah satu cara untuk mengatasi hal itu adalah mencari bentuk penghayatan nilai keagamaan yang lebih baik dan sehat. Di antara hal yang harus dilakukan oleh dosen agama (Islam) adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengembangkan dimensi Qur'ani yang tidak membatasi Islam hanya pada hal-hal yang bersifat ubudiyah-ritual saja. Berkaitan dengan hal itu, maka agama tidak lagi dipandang sebagai *something to use but not to life*, tetapi agama harus dipahami dan dijelaskan sebagai *unfying factor* (faktor pemandu bagi kehidupan manusia) dan *driving integrating motive* (pengendali setiap kehendak yang dimiliki manusia).
2. Memahami dan mengembangkan dimensi keruhanian dan kecintaan Ilahi untuk mengantisipasi paham keagamaan

Proof
SB
Read

yang formalistik-ritualistik dan literalis kosong. Agar dihayati makna salat sebagai wujud pengabdian kepada Allah, zakat sebagai wujud penyatuan dengan dimensi kemanusiaan, haji sebagai wujud penyatuan dengan dimensi umat seluruh dunia, dan puasa sebagai sarana untuk mengingat kepada Allah dan orang-orang lapar (miskin) sekali pun. Termasuk dalam hal ini adalah menjelaskan kembali tentang akidah yang harus dipahami dengan aspek apa yang Allah Swt. perintahkan kepada manusia ketika seorang manusia telah beriman kepada-Nya, *syakhshiyah* (kepribadian) dan akhlak merupakan perwujudan pemahaman terhadap keseluruhan nilai-nilai yang terdapat dalam Islam.

3. Memahami dan mengembangkan dimensi sosial Islam untuk menanggulangi masalah kepentingan pribadi yang saling bertentangan dan untuk mewujudkan pemerataan pembagian kekayaan.
4. Menghidupkan kembali jiwa kritis Islam, setelah jiwa itu dibendung oleh *vested interest* dari berbagai kalangan dengan menghidupkan kembali semangat berjihad.
5. Mengubah pola pengajaran agama yang monoton dan membosankan sehingga formalisme keagamaan yang kering dapat diakhiri.
6. Membangun kesadaran tanggung jawab pribadi kepada Allah Swt. Dalam memahami ajaran-ajaran agama, tanpa mengizinkan wewenang klerikal dan kependetaan karena memang Islam tidak mengenal sistem kependetaan.
7. Mengakhiri mentalitas isolatif dan membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak lain dari kalangan mana pun dalam semangat persaudaraan.

Para dosen agama Islam harus mencerminkan Islam dalam setiap perbuatan dan perkataan, sebab hal ini termasuk bagian yang

tidak luput dari perhatian mahasiswa dalam menilai siapa dosen agama itu. Artinya, dosen agama Islam harus memiliki *syakhshiyah Islamiyah* (kepribadian yang Islami) dan tidak mengalami *disturbance of self image* (keguncangan citra diri).

Untuk dapat melakukan hal itu, maka dibutuhkan dosen-dosen agama yang mumpuni (*intellectual enrichment*) yang melihat khazanah keislaman dalam cakrawala yang luas dan sekaligus mampu memberikan teladan kepada para mahasiswa (masyarakat kampus) dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam tataran kehidupan sehari-hari.

Berkaitan dengan paparan tersebut, maka secara kualitas dan kuantitas pengajaran Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi harus ditingkatkan. Secara kualitas artinya materi-materi Pendidikan Agama harus dapat disampaikan secara profesional oleh para dosen agama sehingga nilai-nilai yang diajarkan dapat diserap oleh para mahasiswa. Di samping itu, materi Pendidikan Agama dapat diperluas tidak hanya menjelaskan iman dan ibadah, tetapi fungsi agama dalam dimensi realitas sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, dan lain-lain. Adapun peningkatan secara kuantitas, artinya bobot SKS untuk menjelaskan nilai-nilai agama dibutuhkan waktu yang cukup leluasa dan panjang sehingga diharapkan dengan pembobotan yang lebih dari dua SKS (misalnya empat SKS) para dosen agama dapat menyampaikan nilai-nilai agama tersebut secara sistematis dan tidak tergesa-gesa. Dan yang terpenting dari hal itu adalah terjadinya dialog dan diskusi yang intens antara dosen dengan mahasiswa seputar masalah-masalah penerapan nilai-nilai agama itu dalam tataran kehidupan bermasyarakat.

Walaupun target pengajaran Pendidikan Agama di PTU bukan untuk mencetak mahasiswa menjadi ahli agama, namun Pendidikan Agama tetap menduduki posisi dan fungsi tersendiri yang mungkin agak berbeda dengan mata kuliah lainnya. Salah satu fungsinya antara lain untuk menanamkan nilai-nilai agama secara benar

yang menjadi filter terhadap paham-paham dan nilai-nilai lain yang masuk ke dalam PTU.

Kita semua berharap bahwa proses Pendidikan Agama di PTU dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada, serta dapat menjadi bekal yang berharga bagi para mahasiswa pada saat mereka harus berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang terdapat di dalam kehidupan. Di samping itu, semoga Pendidikan Agama di PTU dapat mengeliminir dampak-dampak negatif dari paham-paham pengkultusan dan sifat-sifat agresif yang menyesatkan.

ProofRead
SB

ProofRead
SB

Bab 8

ORGANISASI MAHASISWA DAN POLITIK KEBANGSAAN

A. Uraian

Kemunculan dan perkembangan kelompok “sempalan” yang cenderung eksklusif, ekstrem, dan radikal dalam Islam memiliki sejarah yang panjang dengan akar historis yang amat kompleks. Karena itu, kajian tentang kelompok “sempalan” yang eksklusif dan radikal di kalangan kaum Muslim, lebih khusus lagi mahasiswa, harus melibatkan pendekatan multidimensional: doktrinal, sosial, politis, ekonomis, dan sebagainya. Pendekatan yang melihat hanya dari satu sisi saja tidak hanya akan menimbulkan pemahaman yang tidak tepat, tetapi juga akan menciptakan mispersepsi dan distorsi terhadap citra Islam itu sendiri.

Dalam tulisan sederhana ini berusaha akan dibahas akar-akar historis kelompok sempalan—dalam pengamatan sementara—cenderung tumbuh dan berkembang lebih subur di kalangan “mahasiswa umum”, tidak di kalangan mahasiswa perguruan tinggi agama, seperti IAIN. Kecenderungan seperti ini mendorong munculnya berbagai pertanyaan dan asumsi. Misalnya, apakah kecenderungan itu merupakan suatu indikasi “penguatan”—untuk tidak menggunakan istilah “rigidisasi”, atau “eksklusivisasi” dan bahkan “radikalisasi”—di kalangan mahasiswa PTU; dan sebaliknya, “Pelonggaran”—untuk tidak menggunakan istilah “liberalisasi”—

Islam di kalangan mahasiswa perguruan tinggi agama semacam IAIN.

Harus diakui, belum ada kajian komprehensif yang memberikan peta yang relatif akurat dan sahih tentang kecenderungan perkembangan kelompok eksklusif Islam di kalangan mahasiswa perguruan tinggi umum di Indonesia. Sementara ini baru terdapat kajian-kajian terbatas, yang memberikan sedikit gambaran tentang hal tersebut. Oleh karena itu, agaknya perlu kajian mendalam sebelum kita mengambil kesimpulan dan rekomendasi berkenaan dengan hal itu.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, berdasarkan pengamatan selintas terhadap kehidupan keagamaan di kalangan mahasiswa, agaknya perlu dilakukan pembedaan, distingsi, atau tipologi mengenai kecenderungan gerakan keagamaan di kalangan mahasiswa pada umumnya. Distingsi ini diperlukan tidak sekadar untuk “memetakan” kecenderungan dari gerakan-gerakan yang ada, tetapi lebih penting lagi, untuk memahami, dan selanjutnya, mengantisipasi arah gerakan-gerakan tersebut.

Sebagian besar mahasiswa dapat dipastikan mengikuti *mainstream* keagamaan masyarakat Muslim. Mayoritas kelompok besar ini, juga dapat dipastikan memahami dan melaksanakan agama secara “tradisional” dan “konvensional”. Sebagian mereka bahkan tidak terlalu peduli dengan atau *convert* terhadap agama. Mereka yang peduli, seperti dapat disaksikan, melaksanakan ajaran-ajaran agama selayaknya dan seadanya, sebagaimana mereka terima dari orang tua dan lingkungan sosialisasi keagamaan yang biasa. Mereka ini dapat disebut sebagai “*common*” Muslim, yaitu Muslim yang melaksanakan ajaran agama, tetapi tidak terlalu bersemangat. Kelompok kedua adalah mahasiswa yang merasa perlu mengembangkan diri, dalam konteks keagamaan, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Islam, dan dalam konteks akademis, untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan keterampilan ilmiah. Mahasiswa yang memiliki kecenderungan ini memilih untuk bergabung dalam

organisasi mahasiswa Islam, seperti: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dorongan untuk memasuki organisasi mahasiswa Islam itu menjadi lebih kuat ketika mahasiswa menyatakan bahwa terdapat cukup banyak anggota atau mantan anggota mereka yang kemudian menonjol dan cukup terkemuka, baik dalam lingkungan kampus maupun setelah mereka keluar atau tamat dari perguruan tinggi. Dengan demikian, organisasi mahasiswa Islam tersebut “menjanjikan” tidak hanya peningkatan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan, tetapi juga mobilitas akademis dan mobilitas sosial politik kelak.

Namun demikian, organisasi-organisasi mahasiswa Islam ini setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir mengalami kemerosotan, khususnya dalam keanggotaan. Kemerosotan itu tidak hanya disebabkan perubahan politik pada tingkat nasional terhadap kehidupan mahasiswa—seperti Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang merupakan “depolitisasi” mahasiswa—menjelang akhir 1980; tetapi juga karena perubahan dalam sistem pendidikan tinggi sendiri, seperti: pengenalan sistem kredit semester yang menggiring mahasiswa untuk lebih berkonsentrasi pada perkuliahan dan tugas-tugas akademis lainnya, ketimbang keterlibatan dalam organisasi mahasiswa (Islam) yang cenderung manghabiskan banyak waktu (*time consuming*).

Lebih dari itu, organisasi-organisasi mahasiswa Islam yang telah mapan ini cenderung terlambat mengantisipasi perubahan kehidupan keagamaan pada skala yang lebih luas. Di antara faktor yang paling signifikan adalah bangkit dan terus meningkatnya euforia di kalangan kaum Muslimin pada umumnya terhadap keberhasilan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, yang kemudian diikuti dengan apa yang dikenal sebagai “kebangkitan kembali Islam” (*Cf.* Dekmejian, 1995; Kepel, 1984). Euforia dan semangat kebangkitan Islam ini mendorong banyak orang, termasuk di kalangan mahasiswa untuk “kembali” kepada Islam. Tetapi hasrat

untuk kembali kepada Islam ini, hampir tidak dapat direspon oleh organisasi-organisasi mahasiswa Islam tersebut. Mereka tetap berlutut dengan orientasi dan program-program konvensional. Hasilnya, organisasi-organisasi mahasiswa Islam tersebut semakin tidak menarik dan mengalami kemerosotan dalam jumlah keanggotaan yang mereka miliki.

Semua perkembangan ini pada gilirannya memunculkan kelompok ketiga yang menjadi inti pembahasan kita. Yakni kemunculan kelompok-kelompok mahasiswa yang lebih berorientasi kepada Islam, yang dalam masa aksi-aksi mahasiswa di tengah krisis ekonomi Indonesia sekarang ini, sering disebut sebagai “kelompok hijau”. Kemunculan mereka dalam tahap pertama ditandai dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil yang pada paroan pertama dasawarsa 1980-an dulu populer di Indonaiia sebagai *usrah*. Meskipun secara harfiah istilah ini sederhananya berarti “keluarga”, secara konseptual dan aktual “*usrah*”, merupakan unit terkecil dari sebuah gerakan lebih luas. Sistem “*usrah*” itu sendiri sebenarnya tidak baru dalam nomenklatur gerakan Islam kontemporer. Ia sudah digunakan secara luas di kawasan-kawasan Dunia Muslim lainnya, khususnya di Timur Tengah dan Anak Benua India. Sistem “*usrah*” bahkan merupakan tulang punggung dari program kaderisasi organisasi semacam *al-Ikhwan al-Muslimun* di Mesir atau bagian-bagian Timur Tengah lainnya, atau organisasi Jama'ati Islami di Pakistan.

Tidak begitu jelas, apakah “*usrah*” yang berkembang di Indonesia pada dasawarsa 1980-an itu mempunyai kerangka organisasi yang lebih luas. Sebagian mungkin memiliki jaringan internasional; tetapi sebagian lain kelihatannya tidak. “Usrah-usrah” yang disebutkan terakhir ini, dengan demikian, lebih merupakan “*usrah-usrah*” lokal, yang dibentuk oleh suatu kepemimpinan tertentu—yang juga biasa disebut “imam” atau “amir” dengan tujuan-tujuan yang relatif terbatas, seperti sekadar untuk peningkatan pemahaman dan pengamalan Islam. Kelompok “*Usrah*” seperti ini, meski eksklusif—dan karena itu dituduh sebagai “sempalan”, pada dasarnya

tidak mengkhawatirkan; atau tidak akan mendatangkan "bahaya" keagamaan, sosial, dan politik (*religious, social and political repercussion*) (Cf. Djamas, 1991; Billah, 1991).

Namun, "usrah-usrah" yang dalam satu dan lain hal mempunyai koneksi dan jaringan internasional, mempunyai agenda-agenda yang jauh lebih luas (Cf. Azra, 1996a; 1997b). Di antara agenda penting mereka adalah penciptaan apa yang mereka sebut sebagai '*al-nizham al-islam*' secara total dan meyeluruh (kaffah). Usrah-usrah seperti ini sangat eksklusif dan pada dasarnya sangat radikal. Karena itu, usrah-usrah ini cenderung sangat politis. Meskipun demikian, disebabkan alasan-alasan tertentu, seperti dijelaskan di bawah, mereka melakukan domestifikasi terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka kemudian terlihat tidak "berbahaya", setidaknya secara politis.

Dalam kerangka agenda-agenda politik tersebut, khususnya dalam penciptaan *al-nizham al-Islami* dan gerakan *hakimiyah* (kedaulatan) Allah, mereka secara terbuka maupun tertutup melakukan oposisi terhadap pemerintah yang mereka pandang sebagai *thaghut*. Menurut mereka, *thaghut* harus dilawan dengan cara apa pun, yang paling puncak di antara upaya-upaya tersebut, tentu saja adalah jihad. Manifestasi dari oposisi keras mereka terhadap apa yang mereka sebut sebagai *thaghut* tadi adalah pembakaran kartu tanda penduduk (KTP), uang kertas, penolakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (Kecamatan). Masih ada kerangka perlawan terhadap masyarakat yang telah dikuasai *thaghut* dan nilai- nilai "*jahiliyah* ", mereka menolak otoritas orang tua dan pemimpin agama "resmi", tidak mau menjawab salam dari Muslim lain di luar kelompok mereka; bahkan kelompok seperti ini melakukan *takfir* terhadap kaum Muslimin lainnya. Dan karena itu, mereka harus melakukan "hijrah" dari *mainstream* Muslim. Sebaliknya, otoritas yang mereka akui secara tanpa *reserve* hanyalah "imam" dan "amir" mereka saja. Dengan semua karakteristik itu, maka bukanlah tanpa alasan kalau kelompok-kelompok eksklusif

dan radikal seperti itu oleh *mainstream* Muslimin disebut sebagai “kelompok sempalan” (*splinter groups*).

Termasuk di antara kelompok-kelompok usrah adalah Jama'ah Takfir wa al-Hijrah, Hizb al-Tahrir, dan Jama'ah Tarbiyah. Kelompok-kelompok ini dapat ditemukan, apakah secara terbuka maupun terselubung, di berbagai kampus perguruan tinggi umum di Indonesia. Saya pernah diundang oleh kelompok-kelompok seperti ini di beberapa kampus di pulau Jawa untuk membahas konsep *khilafah*: yang menjadi tujuan dan agenda politik mereka. Dari diskusi dan dialog yang berlangsung, terihat bahwa memegangi secara ketat kerangka doktrinal dan konsepsional yang mereka percaya sebagai satu-satunya pemahaman dan pengamalan Islam yang sah.

Tetapi, lagi-lagi tidak semua kelompok usrah yang memiliki jaringan internasional ini bersifat ekstrem dan radikal. Terdapat pula kelompok-kelompok usrah yang “jinak”, karena pada dasarnya tidak (atau belum) menganut tujuan politis. Yang paling menonjol di antara kelompok seperti ini adalah Jama'ah Tabligh yang berasal dari India. Termasuk ke dalam kategori ini agaknya adalah kelompok-kelompok *usrath* Syi'ah yang juga tumbuh subur di kalangan kaum muda dan mahasiswa. Aliran Syi'ah di Indonesia di masa kontemporer sekarang ini kelihatannya baru sampai pada tahap pengenalan dan pemahaman doktrinal, belum pada tahap indoktrinasi ideologis revolusioner Syi'ah. Perkembangan kelompok-kelompok sempalan yang ekstrem dan radikal di antara kaum Muslimin di masa modern dan kontemporer sangat kompleks. Kompleksitas itu pada dasarnya bukan terletak pada doktrin; karena secara doktrinal kelompok sempalan, khususnya yang ekstrem dan radikal tersebut umumnya mengikuti pola dan paradigma teologis kaum Khawarij—seperti akan dikemukakan di bawah—yang di sana-sini disesuaikan dengan tantangan pemikiran modern dan kontemporer. Oleh karena itu, kompleksitas itu terutama terletak pada akar-akar: sosio-historis dan politis, atau *social origins* kelompok ekstrem tersebut.

Salah satu penyebab kompleksitas yang mampengaruhi kemunculan dan perkembangan kelompok ekstrem dan radikal Muslim—dan bahkan gerakan Islam pada umumnya—di masa modern dan kontemporer itu adalah faktor Eropa atau Barat pada umumnya. Bagi banyak kaum Muslim, Eropa atau Barat merupakan salah satu faktor pendorong penting bagi upaya-upaya pembaruan di kalangan kaum Muslimin yang pada gilirannya muncul dalam bentuk “modernisme” atau “reformisme”. Bagi mereka, untuk mengangkat kaum Muslimin dari kemunduran dan keterbelakangan, dalam segi-segi tertentu perlu dilakukan adopsi pemikiran dan kelembagaan Barat. Tetapi sebaliknya, bagi kelompok ekstrem dan radikal umumnya, Barat merupakan salah satu faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran dan keterbelakangan kaum Muslimin. Dalam pandangan mereka, Barat tidak hanya telah menjajah wilayah kaum Muslimin (*dar al-Islam*), tetapi juga merusak dan menghancurkan sistem nilai, budaya, sosial, ekonomi, intelektual Islam, serta sekaligus merusak dan melenyapkan lembaga-lembaga Islam, seperti lembaga pendidikan, politik, hukum, dan sebagainya. Padahal, pada saat yang sama, Barat itu sendiri, menurut kelompok ekstrem dan radikal ini, dipenuhi kebobrokan terutama dari segi moral dan keimanan. Oleh karena itu, Barat harus dilawan. Di sinilah dapat dilihat salah satu ciri paling menonjol dari kelompok ekstrem dan radikal Muslim, yaitu sikap anti Barat (*anti Western*)-nya.

Sikap anti Barat ini semakin mengental di kalangan kelompok ekstrem Muslim, ketika melihat kenyataan bahwa Barat mendukung kebanyakan rezim pemerintahan Muslim setelah Perang Dunia Kedua yang merupakan rezim-rezim sekuler yang tentu saja, menganut ideologi sekuler. Penganutan ideologi ini bukan hanya tidak cocok, tetapi bahkan bertentangan dengan atau anti Islam. Ini terlihat khususnya dalam ideologi yang subur pada negara-negara Islam di Timur Tengah umumnya, seperti sosialisme, komunisme, dan kemudian kapitalisme liberal. Celakanya lagi, rezim-rezim sekuler, dengan bantuan Barat bertindak sangat opresif. Karena itulah

mereka sering melakukan terorisme negara kepada setiap kelompok yang mereka pandang dapat mengancam *status quo* kekuasaan dan ideologi sekuler mereka.

Kenyataan inilah yang pada gilirannya menciptakan semacam *vicious circle*, lingkaran setan, antara radikalisme kelompok-kelompok ekstrem Muslim, yang justru menemukan *raison d'etre* eksistensi mereka dalam tindakan-tindakan opresif dengan terorisme negara. Pada satu pihak, di kalangan kelompok ekstrem Muslim, atas nama Islam atau kebangkitan Islam, sebagaimana telah dikemukakan di atas, berkeinginan menegakkan apa yang mereka sebut sebagai “tatanan politik Islam” (*al-nizham al-Islam*) secara menyeluruh dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan ini, mereka pada umumnya menggunakan pendekatan politik, tegasnya dengan menumbangkan rezim sekuler dan menghapuskan ideologi sekuler. Dengan menggunakan pendekatan politik ini, sebagai konsekuensi logisnya kelompok-kelompok radikal Muslim tersebut berhadapan *head-to-head*, laga kambing, dengan rezim yang berkuasa. Pada pihak lain, penguasa-penguasa sekuler yang mempertahankan *status quo*, melakukan apa saja untuk menindas dan melenyapkan kelompok-kelompok ekstrem Muslim, termasuk terorisme negara.

Dengan demikian, kelompok-kelompok radikal Muslim berhadapan dengan tiga front yang kuat. Pertama, dengan pihak Barat yang menurut mereka merupakan *roots of all evils*. Kedua, dengan rezim-rezim penguasa Muslim sekuler yang memegangi ideologi yang bertentangan dengan Islam. Ketiga, dengan *mainstream*. Kaum Muslimin yang menolak ekstremisme dan radikalisme dalam aktivisme politik mereka, serta literalisme mereka dalam memahami doktrin Islam.

See Read Sebuah daftar dapat diajukan untuk melihat kelompok-kelompok ekstrem radikal yang terdapat di berbagai kawasan Dunia Muslim sekarang ini. Di kalangan kaum Sunni terdapat kelompok-kelompok ekstrem yang berbentuk organisasi. Misalnya, *Tanzhim*

al-jihad (Tatanan Jihad), *Hizb al-Tahrir* (Partai Pembebasan), *al-Najun min al-Nar* (orang-orang yang selamat dari neraka), *al-Jama'ah al-Islamiyah*, *al-Tafkir wa al-Hijrah*, *Jama'ah al-Muslimin li al-Takfir*, semuanya di Mesir; *Harakah al-Tawhid al-Islami* (Gerakan Tauhid Islam) dan *al-Tali'ah al-Muqatilah li al-Mujahidin* (Pasukan Tempur Kaum Mujahidin), keduanya di Syria; *Harakah al-Tawhid* (Gerakan Tauhid) di Libanon, *al-Jihad al-Islami*, *Harakah al-Muqawwamah al-Islamiyah* (Hamas), keduanya di Palestina; *al-Jabhab al-Islamiyah al-Inqaz* (FIS) di Aljazair. Kamudian di kalangan Syi'ah terdapat *Hizb 'l-Lah* (Partai Allah), *al-Jihad al-Islami*, *al-Amal al-Islami* (Harapan Islam), semuanya di Libanon; *Hizb Da'wah al-Islamiyah* di Irak dan negara-negara Teluk; *Munazzamat al-Tsawrah al-Islamiyah fi Shubuh al-Jazirah al-'Arabiyah* (Organisasi Revolusioner di Semenanjung Arabia), dan sebagainya (Cf. Dekmejian, 1995; Dawisha, 1986).

Sebagaimana dikemukakan di atas, sebagian kelompok ini juga mempunyai “cabang-cabang” di Indonesia kemunculan kelompok-kelompok sempalan yang ekstrem dan radikal dalam kalangan Muslimin berakar justru bukan dari doktrin agama Islam itu sendiri, melainkan dari konflik politik di antara kaum Muslim tidak lama setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Sebagaimana diketahui, dalam masa pemerintahan Utsrnan ibn Affan, khalifah ketiga *al-Khulafa' al-Rasyidun* (memerintah tahun 24-36 H./644- 656 M.), terjadi konflik di antara kaum Muslimin. Terdapat pihak-pihak yang memprotes Utsman, yang dianggap telah melakukan politik nepotisme, karena beberapa anggota kabilahnya muncul menempati posisi penting dalam pemerintahan. Utsman akhirnya mengalami nasib tragis, terbunuh di tangan kelompok yang memprotes dan memberontak terhadap pemerintahannya.

Tewasnya khalifah Utsman ibn Affan tidak mengakhiri persoalan. Bahkan peristiwa tersebut menandai permulaan skisma di antara kaum Muslimin. Tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang agama, khususnya teologi (*kalam*). Pada satu pihak tewasnya Utsman mendorong sebagian Muslimin untuk mengangkat

Ali ibn Abi Thalib sebagai *al-khulafa' al-rasyidun* keempat (memerintah tahun 36-41 H./656-661 M.). Tetapi keluarga dan kabilah Utsman, di bawah pimpinan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan memprotes dan menuntut agar persoalan pembunuhan Utsman diselesaikan lebih dahulu sebelum memilih atau mengangkat khalifah penggantinya. Konflik ini pada akhirnya berpuncak pada pecahnya Perang Siffein di antara para pendukung Ali melawan barisan Mu'awiyah. Perang berkepanjangan yang terjadi tahun 656-661 itu juga terkenal sebagai *al-fithnat al- akbar*, perang sipil terbesar pertama di antara kaum Muslimin. Perang itu hampir dimenangkan oleh barisan Ali ibn Abi Thalib, tetapi pasukan Mu'awiyah mengusulkan perdamaian, yang kemudian diterima oleh Ali.

Penerimaan perdamaian ini merupakan asal-usul dari kemunculan kelompok ekstrem dan radikal pertama di antara kaum Muslimin. Kelompok ini dikenal sebagai kaum "Khariji" atau "Khawarij", yang secara harfiah berarti "orang-orang yang keluar" (dari barisan Ali ibn Abi Thalib). Sebaliknya, mereka yang tetap mendukungnya kemudian dikenal sebagai "Syi'ah", yang secara harfiah berarti "partai" atau "kelompok" (Ali ibn Abi Thalib).

Kaum Khawarij keluar dari barisan Ali yang telah melakukan "dosa besar" karena menerima usulan perjanjian damai dari agresor (Mu'awiyah) terhadap khalifah yang sah (Ali); padahal Mu'awiyah harus diperangi sampai tunduk. Dengan demikian, Ali dipandang telah keluar dari barisan kaum Muslimin secara keseluruhan. Landasan doktrin yang digunakan oleh kelompok Khawarij ini adalah Al-Qur'an Surat al-Hujurat (49) ayat 9, yang menyatakan bahwa jika dua kelompok kaum Muslimin bertikai, maka damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu pihak menolak, maka kelompok itu harus diperangi sampai mereka kembali ke jalan Allah. Selanjutnya mereka juga menggunakan surat al-Anfal (8) ayat 39-40 kemunculan kelompok-kelompok sempalan yang ekstrem dan radikal dalam kalangan Muslimin berakar justru bukan dari doktrin agama Islam itu sendiri, melainkan dari konflik politik di antara kaum Muslim

tidak lama setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Sebagaimana diketahui, dalam masa pemerintahan Utsman ibn Affan, khalifah ketiga *al-Khulafa' al-Rasyidun* (memerintah tahun 24-36 H./644-656 M.), terjadi konflik di antara kaum Muslimin. Terdapat pihak-pihak yang memprotes Utsman, yang dianggap telah melakukan politik nepotisme, karena beberapa anggota kabilahnya muncul menempati posisi penting dalam pemerintahan. Utsman akhirnya mengalami nasib tragis, terbunuh di tangan kelompok yang memprotes dan memberontak terhadap pemerintahannya.

Tewasnya khalifah Utsman ibn Affan tidak mengakhiri persoalan. Bahkan peristiwa tersebut menandai permulaan skisma di antara kaum Muslimin. Tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang agama, khususnya teologi (*kalam*). Pada satu pihak tewasnya Utsman mendorong sebagian Muslimin untuk mengangkat Ali ibn Abi Thalib sebagai *al-khulafa' al-rasyidun* keempat (memerintah tahun 36-41 H./656-661 M.). Tetapi keluarga dan kabilah Utsman, di bawah pimpinan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan memprotes dan menuntut agar persoalan pembunuhan Utsman diselesaikan lebih dahulu sebelum memilih atau mengangkat khalifah penggantinya. Konflik ini pada akhirnya berpuncak pada pecahnya Perang Siffein di antara para pendukung Ali melawan barisan Mu'awiyah. Perang berkepanjangan yang terjadi tahun 656-661 itu juga terkenal sebagai *al-fithnat al-akbar*, perang sipil terbesar pertama di antara kaum Muslimin. Perang itu hampir dimenangkan oleh barisan Ali ibn Abi Thalib, tetapi pasukan Mu'awiyah mengusulkan perdamaian yang kemudian diterima oleh Ali.

Penerimaan perdamaian ini merupakan asal-usul dari kemunculan kelompok ekstrem dan radikal pertama di antara kaum Muslimin. Kelompok ini dikenal sebagai kaum "Khariji" atau "Khawarij", yang secara harfiah berarti "orang-orang yang keluar" (dari barisan Ali ibn Abi Thalib). Sebaliknya, mereka yang tetap mendukungnya kemudian dikenal sebagai "Syi'ah", yang secara harfiah berarti "partai" atau "kelompok" (Ali ibn Abi Thalib).

Kaum Khawarij keluar dari barisan Ali yang telah melakukan “dosa besar” karena menerima usulan perjanjian damai dari agresor (Mu’awiyah) terhadap khalifah yang sah (Ali); padahal Mu’awiyah harus diperangi sampai tunduk. Dengan demikian, Ali dipandang telah keluar dari barisan kaum Muslimin secara keseluruhan. Landasan doktrin yang digunakan oleh kelompok Khawarij ini adalah Al-Qur'an Surat al-Hujurat (49) ayat 9, yang menyatakan bahwa jika dua kelompok kaum Muslimin bertikai, maka damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu pihak menolak, maka kelompok itu harus diperangi sampai mereka kembali ke jalan Allah. Selanjutnya mereka juga menggunakan surat al-Anfal (8) ayat 39-40 Tidak seluruh kelompok “sempalan” di atas merupakan kelompok sempalan dalam pengertian “menyimpang” dari doktrin Islam. Sebaliknya, penyebutan mereka sebagai kelompok sempalan lebih karena sikap politik dan kultural mereka, yang cenderung berlawanan dengan penguasa Muslim, dan bahkan dengan *mainstream* kaum Muslimin.

Namun demikian, pertanyaan yang tetap menggayut adalah: Apakah ada relevansi antara kelompok sempalan yang ekstrem dan radikal, yang tumbuh dan berkembang di Timur Tengah tadi dengan yang berkembang di Indonesia? Kalau ada, bagaimana dampaknya?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab dalam tulisan yang sederhana ini. Tetapi satu hal yang penting, sebagian dari kelompok yang disebutkan itu juga menemukan pengikutnya di kalangan mahasiswa dan kaum muda di Indonesia, sebagaimana dikemukakan di atas, yang antara lain mencakup Jama'ah Tafkir wa al-Hijrah, Jama'ah Tarbiyah, dan sebagainya.

Terlepas dari eksistensi kelompok sempalan seperti itu, dalam pandangan saya, mereka tidak terlalu relevan dengan kaum Muslimin Indonesia. Kenyataan ini disebabkan setidaknya oleh lima faktor pokok sebagai berikut ini.

Pertama, Islam di Indonesia sepanjang sejarahnya tidak pernah mengalami ekstremisasi sebagaimana yang dialami kaum Muslimin

Timur Tengah. Sebaliknya, yang terjadi adalah perkembangan Islam yang pada umumnya berlangsung secara damai. Memang kaum Muslimin, khususnya kalangan tarikat pernah mengalami semacam radikalasi, khususnya ketika Belanda semakin mengkonsolidasikan kekuasaannya terutama sejak abad 18. Tetapi radikalasi itu tidak pernah mengejawantah dalam ekstremisme politik pada level yang tinggi doktrin jihad memang pernah dikembangkan oleh beberapa ulama Indonesia tertentu pada zaman penjajahan Belanda, seperti 'Abd al-Samad al-Palimbani, tetapi tidak pernah terwujud dalam skala besar dan dalam waktu yang lama.

Kedua, berkenaan dengan faktor pertama tadi, kaum Muslimin Indonesia pada umumnya adalah orang-orang yang akomodatif, kalau tidak dapat dikatakan cenderung sinkretik. Oleh karena itu, ekstremisme dan radikalisme tidak pernah populer di Indonesia. Memang pernah terjadi gerakan ekstrem semacam Gerakan Padri di Minangkabau pada abad 19. Tetapi gerakan ini adalah satu-satunya gerakan ekstrem yang berusia pendek; untuk selanjutnya mengalami domestifikasi ketika harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan politik yang kompleks.

Ketiga, Pancasila yang diterima sebagai dasar negara dan ideologi nasional sejak kemerdekaan, secara esensial tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan sebaliknya, hampir seluruh tokoh, ulama dan pemimpin Muslim Indonesia berpendapat bahwa Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kalaupun pernah ada usaha dari kalangan tertentu Muslimin Indonesia untuk mengganti dasar negara dari Pancasila menjadi Islam, maka hal tersebut adalah usaha-usaha bersifat sporadis, yang justru ditentang oleh mayoritas Muslimin Indonesia. Dari sudut esensi dan watak ideologi Pancasila yang tidak bertentangan dengan agama (Islam) itu, maka tidak ada *raison d'être* yang kuat bagi kemunculan kelompok ekstrem yang solid untuk mengubah dasar dan ideologi nasional tersebut dengan Islam. Keempat, pemerintahan Indonesia pada dasarnya adalah pemerintah yang dapat dikategorisasikan sebagai *soft regime*, yang

lebih toleran dan jauh tidak represif terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi untuk menjadi ekstrem dan radikal, apabila dibandingkan dengan rezim-rezim di Timur Tengah. Kenyataan ini mengakibatkan tidak terjadinya radikalisasi kelompok-kelompok yang berpotensi untuk menjadi ekstrem. Kekerasan dan terorisme negara hanya akan mendorong kelompok-kelompok seperti itu untuk menjadi lebih radikal dan ekstrem.

Kelima, perubahan politik pemerintah yang sejak kebangkitan Orde Baru sampai menjelang akhir 1980-an cenderung *hostile* kepada gerakan Islam. Kelompok-kelompok usrah yang cenderung eksklusif dan radikal seolah-olah menemukan *ground* dengan kebijakan ini. Tetapi mereka kehilangan momentum, ketika sejak awal 1990-an pemerintah mengubah kebijakan politiknya dengan melakukan *rapprochement* yang bahkan sering disebut sebagai *honeymoon* kepada gerakan Islam dan kaum Muslimin umumnya. Dalam era globalisasi sekarang ini, sulit dihindari gagasan atau kelompok ekstrem, sebagaimana dikemukakan di atas, juga dapat masuk ke Indonesia. Bahkan, dalam waktu belakangan, terdapat kecenderungan bahwa paham dan aliran ekstrem seperti ini juga mulai merambah ke Indonesia, dan merasuki sedikit kalangan kaum Muslimin, khususnya generasi muda dan mahasiswa.

Menurut hemat saya, kelompok-kelompok seperti ini jauh dari populer, apalagi untuk dapat melakukan gerakan yang secara keagamaan dan politik signifikan. Bahkan sebaliknya, kelompok-kelompok tersebut harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dan domestifikasi terhadap pandangan-pandangan dan aktivitas-aktivitas, jika mereka ingin *survive*. Sebagaimana terlihat dari kelima faktor yang dikemukakan di atas, tidak ada *raison d'être* yang solid bagi ~~Pro~~ ~~Stead~~ kemunculan kelompok-kelompok seperti itu. Dan, menurut hemat saya, keempat faktor itu harus senantiasa dikembangkan apabila kita tetap menginginkan untuk mempertahankan kehidupan keagamaan dan politik yang harmonis, rukun, dan penuh toleransi.

Bab 9

NETIZEN MEDIA SOSIAL DAN ISU POLITIK IDENTITAS

A. Uraian

1. Pengaruh Politik Identitas melalui Media Sosial terhadap Generasi Milenial

Politik identitas bisa diartikan sebagai bentuk politik yang fokus utama dari kajian dan permasalahannya menyangkut berbagai perbedaan berdasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, etnisitas, primordialisme, serta pertentangan agama, kepercayaan, ras, atau bahasa, yang mana hal ini akan mengancam persatuan maupun kesatuan bangsa (Maarif, 2012).

Politik identitas merupakan rumusan lainnya dari politik perbedaan. Kemunculan politik identitas merupakan respons terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia (HAM) yang kerap kali diterapkan secara tidak adil. Secara konkret, kehadiran politik identitas ini sengaja dijalankan kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi. Politik identitas ini didasarkan kepada esensialisme strategis, yang mana individu bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis. Tiap gagasan mengenai diri, identitas, komunitas identifikasi (etnisitas, bangsa, atau kelas). Politik yang mengalir hanyalah sebuah fiksi yang menandai pembakuan makna secara temporer, parsial, dan arbitrer. Politik tanpa adanya penyisipan kuasa secara arbitrer ke

dalam bahasa, persilangan arah, pengerasan ideologi, pemosisan, maupun retakan ialah suatu kemustahilan (Hall dan Gay, 1996).

Politik identitas pun tetap tumbuh di tengah era globalisasi serta perkembangan lingkungan strategis saat ini. Segala aspek kehidupan selalu tumbuh secara progresif, di mana perkembangan tersebut beriringan pula dengan perkembangan di masyarakat, dari masyarakat tradisional jadi masyarakat modern, lantas dari perkembangan tersebut, menuntut masyarakat menuju globalisasi. Wujud kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat ini adalah internet, kemudian dilanjutkan dengan kelahiran media sosial. Media sosial telah “memaksa” setiap orang untuk dapat menggunakannya, tidak peduli rentang usia dari penggunanya.

Penduduk Indonesia pun tidak luput dari pertumbuhan media sosial ini. Berdasarkan data terakhir (bulan Januari 2019) yang dirilis We Are Social - Hoorsuit, profil pengguna media sosial di Indonesia, pengguna paling aktif di media sosial berada pada rentang usia 18-24 tahun serta rentang usia 25-34 tahun, yakni masing-masing sebesar 33%. Sementara itu, rentang usia 13-17 tahun cuma sebesar 15% dan rentang usia 35-44 tahun hanya sebesar 12%. Hal ini mengekspos bahwa mayoritas pengguna media sosial di Indonesia adalah Generasi Y atau Generasi Milenial. Generasi milenial 20 tahun lalu tidak terlalu digubris eksistensinya.

Namun saat ini, teramat diperhitungkan, karena menjadi sangat “powerfull” dari sisi ekonomi, bisnis, dan politik. Pada pelaksanaan Pemilu 2019 nanti, generasi milenial bias menjadi kunci kemenangan pileg dan pilpres. Tidak saja karena jumlah yang banyak, 80 juta atau 1/3 total penduduk Indonesia, namun generasi milenial yang berusia 19-39 tahun ini sudah mempunyai hak pilih aktif di Pemilu 2019.

Terkait dengan politik, dari hasil riset yang dirilis oleh KPU di tahun 2018, secara tegas menjelaskan bahwa generasi milenial di Indonesia mempunyai semangat inklusif yang lebih tinggi dibanding

generasi yang sebelumnya, yakni adanya semangat untuk merangkul segala macam latar belakang, ras, suku, hingga agama. Politik inklusif ini menjadi cara atau metode strategis untuk berpartisipasi dalam berpolitik, demokrasi, maupun pemilu.

Namun, faktanya generasi milenial negeri ini masih rentan dengan pertarungan *hoax*, pelintiran kebencian, maupun politik identitas. Terlebih lagi, medan kontestasi di media sosial turut memengaruhi persepsi generasi milenial dalam membangun cara pandang dan melihat masa depan negeri ini. Survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dibulan Agustus 2018 menyoroti aspirasi generasi milenial dalam kepemimpinan, politik, dan toleransi.

Survei ini memakai 1.200 sampel dengan responden yang dikategorikan pada generasi milenial, yakni rentang usia 18-38 tahun, yang dipilih secara acak/*random* dari 34 provinsi di Indonesia. Pada riset tersebut, generasi milenial menyuarakan tantangan besar di Indonesia, dimulai dari aspek keterbatasan lapangan pekerjaan (25,5%), tingginya harga pangan (21,5%), serta tingginya angka kemiskinan (14,3%).

Dari riset ini, terbaca mayoritas generasi milenial selalu mengakses media sosial untuk menyebarkan penyerapan info. Sebanyak 54,3% responden mengaku rajin mengakses media sosial setiap hari. Hanya 6,3% generasi ini yang mengakses info dari media cetak, serta 56% telah meninggalkan media dengan format cetak. Ihwal akses di media sosial, maka 81,7% generasi milenial menggunakan Facebook, disusul WhatsApp (70,3%), BBM (61,7%), Twitter (23,7%), serta Instagram (16,2%).

Riset CSIS ini juga memotret batas-batas politik dan toleransi dalam kehidupan generasi milenial. Generasi ini cenderung tidak setuju jika ada gagasan mengganti Pancasila dengan ideologi yang berbeda. Aspirasi ketidaksetujuan ini sangat tinggi, yakni sebesar 90,5%, berbanding terbalik dengan yang setuju (9,5%).

Namun, dalam ihwal penerimaan terhadap pemimpin yang berbeda agama, generasi ini cenderung tak bisa menerima (53,7%), sedang yang dapat menerima pemimpin beda agama sebanyak 36,3%. Sedangkan terkait dengan politik, generasi milenial cenderung belum miliki pilihan politik ketika survei berlangsung (71,3%), sebaliknya sebanyak 28,7% telah memiliki pilihan politik. Untuk penggunaan media sosial selaku media informasi politik, generasi ini cenderung tidak peduli dengan iklan politik melalui media sosial (68,4%), maka hanya 31,6% generasi ini yang peduli. Sedangkan terkait pandangan generasi ini terhadap isu politik identitas melalui media sosial, generasi ini cenderung tidak tertarik (86,7%), dan hanya 13,3% yang tertarik

Mencermati hasil dari survei tersebut, maka menjadi signifikan untuk membangun interaksi yang lebih segar dengan generasi milenial, dengan menciptakan ruang literasi politik serta komunikasi lintas agama dan budaya. Interaksi ini tidak sekadar sentuhan di media sosial, tetapi juga perlunya berbagi pengalaman secara lebih konkret dan kental dengan impresi yang komprehensif. Ruang publik yang menjadi ruang interaksi antar-pemuda lintas agama, etnis, maupun politik perlu diciptakan sebagai ruang netral untuk merawat kebhinekaan.

2. Dampak Eksploitasi Politik Identitas melalui Media Sosial terhadap Situasi dan Kondisi Sosial Masyarakat

Eksploitasi diartikan sebagai satu hal tindakan untuk memperalat individu lain guna tujuan kepentingan sendiri (Emirzon, 2007). Eksploitasi dapat dimaknai sebagai suatu perilaku diskriminatif atau perlakuan yang dilakukan secara sewenang-wenang di tengah lingkungan publik (Suharto, 2005).

Seiring dengan masih adanya praktik politik identitas, yang mana praktik tersebut kian berkembang modusnya karena adanya perkembangan dari ilmu pengetahuan serta teknologi yang makin pesat. Salah satu dari progresivitas teknologi informasi maupun

komunikasi yang paling digandrungi oleh masyarakat ialah media sosial. Media sosial merupakan media *online*, yang mana para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, hingga menciptakan isi dari media sosial tersebut. Pertumbuhan dari pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat dan lebih tinggi dibandingkan negara lain. Publik di Indonesia memiliki interes yang tinggi pada media sosial, sehingga media sosial mampu mengubah pola penyebaran informasi serta komunikasi. Media sosial ini dimanfaatkan oleh berbagai bidang, baik ekonomi, bisnis, sosial, hingga politik. Untuk bidang politik, media sosial pun digunakan oleh kontestan pemilu sebagai medium kampanye untuk menarik suara pemilih, termasuk generasi milenial. Namun, eksistensi media sosial di dalam bidang politik pun terpapar oleh aksi atau eksplorasi politik identitas.

Beberapa contoh/ujud postingan di media sosial yang terindikasi mengeksplorasi politik identitas. Praktik politik identitas, yakni pencantuman nama keluarga/orang tua (primordialisme). Kontestan pemilu memakai praktik politik identitas, yakni sentimen agama dan tidak mencantumkan foto sendiri kontestan pemilu memakai praktik politik identitas, yakni pencantuman latar belakang sebagai “anak kolong”.

Pemilu memakai praktik politik identitas, yakni sentimen etnis yang diwujudkan melalui penulisan dengan huruf Tionghoa/Mandarin. Sentimen jabatan di masa lalu, yang menegaskan latar belakang kontestan dari aparat penegak hukum kontestan pemilu tidak memberi perhatian pada konteks dari visi atau program yang ingin ditawarkan kepada masyarakat, namun menampilkan identitas personal.

Hal ini apabila dibiarkan tak akan memberikan edukasi politik yang cerdas bagi publik, namun cenderung akan jadi disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial terjadi sebab ada ketidakseimbangan dalam sistem atau pun masyarakat (Tainter, 1990). Untuk itu berbagai

gejala disintegrasi sosial yang mungkin terjadi di dalam suatu masyarakat harus dapat diantisipasi sedini mungkin, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperkuat kesepakatan di lingkungan masyarakat tentang tujuan sosial yang ingin dicapai serta menjadi pegangan masyarakat tersebut,
 - b. Memperkuat norma sosial yang ada untuk menjaga tujuan yang disepakati,
 - c. Meningkatkan penghayatan pada norma-norma yang telah ada di dalam masyarakat,
 - d. Sanksi kian diperkuat serta dilaksanakan secara konsekuensi maupun konsisten, dan
 - e. Tindakan yang dilaksanakan setiap warga masyarakat harus seirama dengan berbagai norma yang berlaku di masyarakat.
3. **Upaya Penanganan Eksplorasi Politik Identitas di Media Sosial oleh Pelaksana Pemilu dan Kementerian/Lembaga Terkait**

Penanganan adalah salah satu bagian dari *legal system*, tidak bisa terpisah dengan substansi hukum (*legal substance*), maupun budaya hukum (*legal culture*). Penanganan terhadap suatu kondisi memiliki keterkaitan dengan instrumen perubahan sosial, yakni hukum selaku sarana perubahan sosial (*law action upon society*), maka hukum memiliki pengaruh terhadap sistem sosial. Untuk itu penanganan secara hukum dapat dilakukan melalui upaya preemtif, preventif, hingga represif (Cotterrell, 2013).

Proyek R&D Upaya preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana, salah satunya dengan menanamkan norma-norma yang terpuji, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri individu. Sedangkan upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya preemtif dan masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak

pidana, yakni menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Sementara tindakan represif adalah upaya penanganan kejahatan secara konsepsional, dilakukan setelah terjadi kejahatan (*law enforcement*), yakni menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya dan memperbaikinya kembali supaya pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum serta merugikan publik, sehingga tak mengulanginya dan orang lain pun tidak akan pula melakukannya, mengingat sanksi yang ditanggungnya (Reith, 1975).

Upaya penanganan eksplorasi politik identitas perlu dilaksanakan secara bertahap serta cermat, karena politik identitas dapat bersifat positif atau negatif. Bersifat positif berarti dapat jadi dorongan untuk mengakui serta mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai tingkat mengakui predikat keistimewaan tertentu, karena alasan yang bisa dipahami secara historis maupun logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antarkelompok satu dengan yang lainnya, seperti dominasi mayoritas atas minoritas (Bagir, 2011).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, pelaksana pemilu, serta kementerian/lembaga terkait dalam proses penanganan dari eksplorasi politik identitas melalui media sosial yaitu:

- a. Melakukan upaya preemptif secara menyeluruh, seperti sosialisasi tentang penggunaan media sosial secara sehat maupun memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendekati partai politik dan kontestan pemilu untuk melaksanakan upaya preventif bersama,
- b. Melaksanakan upaya preventif secara ekstensif dan masif, seperti melaksanakan aktivitas *monitoring*, *cyber patrol*, mendeteksi, hingga *take down* akun media sosial, serta memperkuat sarana dan prasarana, sehingga sebanding dengan jumlah akun media sosial, serta

- c. Upaya represif/penegakan hukum terhadap praktik politik identitas melalui media sosial sudah didukung undang-undang yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) maupun teknis tentang praktik politik identitas, yang mana sebagai perluasan dari UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Profesionalisme dari aparat penegak hukum dan pelaksana Pemilu dalam upaya penanganan dari eksplorasi politik identitas melalui media sosial memerlukan adanya partisipasi dan sinergitas dari *stakeholders*, baik dari kementerian/lembaga pemerintah, seperti dari Kemenkominfo RI (Tim *Cyber Drone* 9), Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Kemenhan RI (*Cyber Defence*), BIN (*Cyber Intelligence*), Kemendagri RI, Kemendikbud RI, Kemenristek dan Dikti RI, hingga BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), serta dari lembaga non pemerintah dan masyarakat, seperti dari ISP (*Internet Service Provider*), penyedia jasa layanan media sosial, partai politik, MUI, konsultan politik, APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), organisasi massa, pakar teknologi informasi dan komunikasi, pakar/akademisi, komunitas/pegawai media sosial, hingga *netizen*/warganet.

ProofRead
SB

Bab 10

PEMILU 2024 DAN RESISTENSI POLITIK IDENTITAS

A. Uraian

Pemilu 2024 menjadi arah baru bagi bangsa ini. Pesta demokrasi pada tahun tersebut menjadi titik nol, apakah semakin dewasa bangsa ini berdemokrasi, atau justru sebaliknya. Jika, pemilu 2024 berjalan lancar, tanpa adanya distorsi, maka bisa menjadi indikator keberhasilan. Selain itu, indikator lainnya ialah bagaimana aktor politik disegala level—dari elite hingga paling bawah mengemas pesan politik yang syarat akan tanda-tanda tanpa pesan politik identitas.

Pemilu 2024 yang menjadi aktornya adalah Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden (Capres–Cawapres), Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres–Cawapres), Pimpinan Partai Politik, Calon Senator (Dewan Perwakilan Daerah (DPD)), Calon Legislator (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) dari Kabupaten/Kota-Provinsi-Pusat, bahkan Kandidat Pimpinan Kepala Daerah (Calon Gubernur/Cagub, Calon Bupati/Cabup, Calon Walikota/Cawalkot).

Para aktor politik di atas, rentan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan besarnya yakni memenangkan kontestasi. Diksi ‘segala cara’ menjadi fokus tersendiri, mengingat ini akan berimplikasi terhadap kemasan pesan dan kemasan cara apa yang dipakai oleh para aktor. Bisa baik caranya, atau, bisa juga buruk

caranya. Bisa baik caranya, misal, menggunakan pesan politik berupa ‘obral janji manis’ berupa program fantastis. Kalau cara buruk, para aktor memainkan pesan provokatif, hoaks, dan *black campaign*. Para aktor dan konsultannya, berupaya menimbang cara yang mana jitu untuk menaikkan rating keterpilihan (elektoral). Mungkin, jika cara yang baik efektif dan efisien, kenapa harus menggunakan cara yang buruk. Tapi, apa ukuran dan jaminannya?

Kembali ke aktor politik, aktor politik yang hingga saat ini digadang-gadang dan menjadi pembicaraan publik terutama di tingkat elite, khususnya pada kontestasi pilpres, yakni ada tiga bakal calon. Ketiganya, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto deklarasi pada Agustus 2022, disusul Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Oktober 2022, sementara Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh Partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Mei 2023. Nominasi tiga nama ini selalu muncul. Selain menjadi topik hangat perbincangan publik virtual maupun nyata. Ketiga nama ini selalu menjadi top three di berbagai lembaga survei nasional. Posisinya masih fluktuatif. Kadang-kadang Prabowo memimpin klasemen sementara, kadang-kadang Ganjar Pranowo yang bercokol di papan atas. Sementara, Anies Baswedan bertahap di posisi ketiga. Meskipun, ketiganya belum ada satu pun yang secara legal-formal resmi menjadi bacapres apalagi capres. Karena, belum memasuki masa pendaftaran di KPU.

Menariknya, seperti pada bab sebelumnya yang penulis sampaikan, bahwa sudah ada stigma atau stempel khusus pada bacapres yang muncul. Prabowo Subianto dicap sebagai menteri paling banyak bersama Presiden Jokowi, ia berupaya menjadi ‘Si Paling Jokowi’. Sama seperti Ganjar Pranowo, yang disinyalir juga berupaya menempel sosok Jokowi. Ganjar dinilai oleh berbagai pihak sebagai sosok penerus perjuangan Jokowi, selain memang mereka sama-sama kader PDIP, juga memiliki gaya khas yang dinilai oleh banyak pihak sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Sementara,

Anies Baswedan dinilai sebagai sosok yang ‘pandai berkata’, dekat dengan kelompok Islam intoleran, dan dikenal menggunakan politik identitas sebagai strategi pemenangannya dalam kontestasi pilgub atau pilkada DKI Jakarta 2017. Belakangan, bos partai Nasdem, Surya Paloh, menyadari begitu sulit bagi timnya untuk menghilangkan stigma Politik Identitas pada sosok Anies. Segala upaya dilakukan oleh Paloh, salah satunya, pada 2 September 2023 disepakati kerjasama politik dengan bos Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhamimin Iskandar, ditandai dengan deklarasi pasangan Anies-Muhamimin, di Surabaya Jawa Timur. Itu salah satu, cara menghilangkan stigma atau stempel Politik Identitas pada sosok Anies, salah satu berpasangan dengan kelompok politik yang katanya mengatasnamakan konstituen Nahdliyyin. Stigma Anies yang cukup negatif juga disampaikan oleh Pengamat Politik dan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, bahwa sosok Anies lebih diidentikkan sebagai tokoh “Islam Politik”.⁵

Belakangan, ternyata, jagat maya dihebohkan dengan hadirnya Ganjar Pranowo pada tayangan Adzan di Inews TV. Diketahui, bahwa Inews TV bagian dari *holding company* MNC Group milik Harry Tanoe Soedibjo (HT). HT ialah bos besar Partai Perindo. Partai Perindo telah mendeklarasikan untuk mengusung Ganjar sebagai kandidat calon presiden pada pemilu 2024. Sebuah kewajaran, bahwa Ganjar sebagai aktor utama dalam tayangan azan sebagai strategi sosialisasi kepada masyarakat luas. Namun, belakangan menjadi kontroversial, selain memang saat Ganjar wudhu lengan bajunya belum digulung. Ternyata, publik heboh karena Ganjar dan tim sedang memainkan identitas, banyak orang menilai Ganjar mempolitisasi ibadah, yang belakangan itu menjadi salah satu indikator politik identitas.

Tidak semua orang mencela kehadiran Ganjar dalam tayangan Adzan di Inews TV. Beberapa pihak justru menanggapi dengan positif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap bahwa hal itu

⁵ Wawancara dengan Ray Rangkuti pada acara Sapa Indonesia Pagi, Edisi 18 Oktober 2023, Pukul 07:50 WIB.

bagian dari upaya mencontohkan atau suri teladan bagi khalayak, berisi ajakan pada kebaikan. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sempat menyurati Inews TV perihal tayangan tersebut, namun belakangan KPI menyebutkan bahwa tidak ada unsur pelanggaran pada tayangan tersebut. Adapun, lembaga yang mengkritisi tayangan itu salah satunya datang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang menilai ada pelanggaran pada tayangan tersebut.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan sulit menjerat bakal capres yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo karena tampil dalam tayangan azan di stasiun televisi milik Harry Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo. Sebab, kata Bagja, saat ini belum ada pendaftaran bakal capres secara resmi oleh KPU sehingga Ganjar tak dapat dianggap peserta Pemilu 2024 kendati telah dideklarasikan sebagai bakal capres oleh PDI-P, PPP, Perindo, dan Hanura.⁶

Sementara itu, pelanggaran sosialisasi maupun kampanye, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, subjek hukumnya adalah peserta pemilu. “Kita kembali lagi ke kampanye atau kemudian sosialisasi. Sosialisasinya peserta pemilu atau bukan, pertanyaannya, kan gitu. Sekarang karena yang bersangkutan ini, tidak ada Beliau ini peserta pemilu, bukan,” ujar Bagja kepada wartawan, Selasa (12/9/2023). “Ajakannya (memilih)? Tidak ada. Kemudian menawarkan visi misi, ada nggak di situ? Tidak juga kan? Itu agak sulit untuk menjerat,” kata dia.

Bagja menegaskan, pihaknya masih melakukan kajian awal terkait kasus ini. Bawaslu masih berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait kajian tayangan tersebut. “Sekarang kami lagi kaji dulu nanti dalam dua hari ke depan. Teman-teman KPI sekarang sudah melakukan klarifikasi kan, sudah cukup sebenarnya di teman-teman KPI dan juga kita akan komunikasi dengan teman-

⁶ Vitorio Mantalean, “Ganjar Tampil di Siaran Azan Bawaslu Akui Sulit Jadikan Pelanggaran”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/13/09273771/ganjar-tampil-di-siaran-azan-bawaslu-akui-sulit-jadikan-pelanggaran>.

teman KPI,” ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, kemunculan Ganjar dalam tayangan azan maghrib di stasiun televisi swasta tertentu bukan politik identitas. “Bukan (politik identitas). Pak Ganjar Pranowo ini sosok yang religius. Religiusitasnya tidak dibuat-buat. Istrinya, Bu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren,” kata Hasto saat dijumpai di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023).

Sebaliknya, kata dia, sebagai seorang muslim, Ganjar telah menjadi teladan bagi sesamanya. Menurut dia, itu gambaran kehidupan Ganjar yang alamiah. Sementara itu, KPI menyatakan sudah menyurati stasiun televisi yang menayangkan adegan Ganjar dalam azan maghrib.

Bacapres dari PDIP, Ganjar Pranowo menyangkap asumsi negatif dirinya di tayangan adzan di sebuah televisi. Ganjar pun membantah soal politik identitas dalam tayangan tersebut.⁷

“Saya menunjukkan diri saya sendiri. Saya menunjukkan saya suka lari, saya menunjukkan saya komunikasi dengan masyarakat. Saya menunjukkan sikap-sikap yang lebih jelas. Sekali lagi saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek,” kata Ganjar, Selasa (19/9/2023).

Ia menceritakan bahwa ketika itu dirinya diajak oleh tim kreatif MNC. Ia menyebut hal itu dilakukan untuk kepentingan perusahaan.

“Saya sebenarnya diajak pada banyak program berikutnya. Sudah kita siapkan program berikutnya yang lain, dan pasti akan juga tayang di sana dan pada saat itu saya hanya mengingatkan kalau ini masuk wilayah kampanye tolong dipertimbangkan, kecuali bukan wilayah kampanye silakan anda pakai,” ucapnya.

⁷ Febrianto A Saputro, “Muncul di Tayangan Azan, Ganjar: Tidak Pernah Saya Gunakan Politik Identitas”, <https://news.republika.co.id/berita/s18r4o330/muncul-di-tayangan-adzan-ganjar-tidak-pernah-saya-gunakan-politik-identitas>. Diakses, 03 Oktober 2023, Pukul 00:03 WIB.

Ia pun kembali menegaskan bahwa dirinya memanfaatkan politik identitas. Menurutnya ada banyak identitas yang bisa dibaca dari dirinya.

“Pada sisi yang lain saya bertemu dengan Bhante, saya bertemu pendeta dan pastur itu diupload lebih dulu sebelum berita ini,” ungkapnya.

Ganjar Pranowo diketahui muncul dalam tayangan adzan di televisi swasta milik Hary Tanoe Soedibjo. Hary Tanoe merupakan Ketua Umum Perindo yang merupakan salah satu partai non-parlemen pendukung Ganjar Pranowo.

Tayangan adzan berisi sosok capres itu menuai pro dan kontra. Ada yang membolehkan, ada yang mencibir, ada yang membela dan ada pula yang menyayangkan karena merasa itu merupakan bagian dari politik identitas.

Dalam tayangan, Ganjar tampak menyambut jamaah yang datang. Memakai koko putih, sarung bermotif batik dan peci hitam, Ganjar diperlihatkan mengambil wudhu sampai menjadi salah satu jamaah di belakang imam. Terkait hal ini, Menag Cholil Tsaqif Qoumas tegas menolak tayangan itu sebagai politik identitas.

“Masa itu politik identitas? Definisinya gimana politik identitas?” kata Yaqut usai menghadiri Pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Surabaya, Rabu 12 September 2023.

Yaqut kemudian mempertanyakan siapa yang menganggap kemunculan Ganjar itu sebagai praktik politik identitas. Menurutnya ini hanya soal sudut pandang. Dia lalu memberikan analogi. Misalnya, jika ia muncul dalam video iklan air mineral, belum tentu ia adalah seorang pedagang produk tersebut. Hal itu sama seperti kasus Ganjar.

“Kalau saya tiba-tiba tampil di iklan minuman air mineral misalnya, masak kemudian saya diidentikkan dengan saya ini tukang jualan air, kan enggak,” ucap Yaqut.

Sebelumnya, bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo tampil dalam tayangan Azan Magrib di stasiun televisi swasta. Ganjar terlihat saat adegan salat berjamaah. Ia mengenakan kemeja putih dilengkapi peci hitam dan sarung batik. Ganjar tampil mempersilakan jemaah untuk masuk masjid.

Di media sosial, banyak yang menganggap itu sebagai politik identitas. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tak ada unsur politik identitas dalam tayangan itu. Hasto mengatakan mengajak masyarakat untuk ibadah adalah hal yang baik.

“Kalau politik identitas itu kan politik yang tidak mencerahkan kehidupan bangsa, politik yang miskin prestasi,” kata Hasto usai menghadiri Senam Bersama 1.000 Aktivis Repdem di Jakarta Pusat, Sabtu, 9 September 2023.

Selain pasangan bacapres-bacawapres AMIN (Anies-Muhaimin) yang suda lama dicap sebagai politik identitas. Sebenarnya, Prabowo Subianto juga bernasib serupa. Ia juga sering disebut orang yang dekat dengan kelompok Islam yang diduga sering menggunakan politik identitas dengan memperdagangkan isu Islam. Namun, sebelum membahas Prabowo. Ada menariknya, membahas tentang pasangan AMIN, yang kembali dikaitkan dengan isu politik identitas. Baru-baru ini, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Menteri Agama RI, Cholil Tsaquf Qoumas beberapa kali melontarkan sindiran terhadap bakal calon presiden yang pernah menggunakan politik identitas pada pemilu. Pernyataan tersebut, sotak memicu amarah pimpinan partai berlambang lebah tersebut. Berikut artikel beritanya,

Jelang tahun politik 2024, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat.⁸

⁸ Indah, “Menag: Jangan Pilih Pemimpin yang Gunakan Agama Sebagai Alat Politik”, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/menag-jangan-pilih-pemimpin-yang-gunakan-agama-sebagai-alat-politik-Qy1Bg>.

“Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah-belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih,” ujar Menag Yaqut di Garut, Minggu (3/9/2023).

Ia juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.

“Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, *rahmatan lil ‘alamin*, rahmat untuk semesta alam. Bukan *rahmatan lil islami, tok*,” kata Gus Men panggilan akrabnya.

Karenanya, pemimpin yang ideal, menurut Gus Men, harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan.

“Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih,” tegasnya.

Gus Men hadir di Garut dalam rangka menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat. Di depan puluhan ribu peserta tablig akbar, Gus Men menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa.

Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia memperoleh pemimpin yang amanah dan dapat mengemban tanggung jawab kemajuan negeri ini.

Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden, kita, lihat betul rekam jejaknya,” seru Gus Men.

Menag berharap tarekat Tijaniyah dapat mengambil peran yang lebih besar menjelang tahun politik untuk mendamaikan umat.

“Yaitu bagaimana umat ini bisa tetap tenang, tetap teduh, tetap damai meskipun berbeda-beda dalam pilihannya. Tentu saya juga berharap tarekat Tijaniyah ini menjadi contoh, bagaimana memilih pemimpin yang baik,” kata Menag menambahkan.

“Bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar. Bangsa yang memiliki keragaman, bangsa yang memiliki banyak perbedaan, tetapi itu menjadi kekuatan kita,” sambungnya.

Pernyataan Menag di atas dikhawatirkan justru akan memicu perpecahan di masyarakat. Hal itu, disampaikan pengamat dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

Jangan sampai pernyataan dari Menag justru malah memicu perpecahan di antara masyarakat.⁹

“Gus Yaqt semestinya tidak membuat pernyataan-pernyataan kontradiktif atau anomali yang bisa memicu pertentangan di masyarakat. Tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang justru akan mendapatkan respon yang negatif dari publik,” ujar Ujang dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

Ujang mengatakan, meski sah-sah saja dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi Gus Yaqt saat ini adalah pejabat publik. Karena itu, alih-alih mengeluarkan pernyataan yang memicu kontroversi, sebaiknya fokus bekerja menjalankan visi misi Presiden.

⁹ Fauziyah Mursid, “Pengamat: Pernyataan Menag Justru Picu Perpecahan”, <https://news.republika.co.id/berita/s0i6f8330/pengamat-pernyataan-menagjustru-picu-perpecahan>.

Sebab, pernyataan tersebut justru berpotensi memicu munculnya politik identitas yang saat ini sudah jauh menurun dibandingkan Pilpres 2019 lalu.

“Para pejabat termasuk para menteri tidak perlu membuat pernyataan tidak perlu. Karena masyarakat sudah paham, sudah tahu bahwa politik identitas harus ditinggalkan, politik SARA juga harus dihilangkan, adu domba juga harus dienyahkan, itu publik masyarakat sudah tahu itu,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengingatkan untuk menghormati pilihan politik setiap orang. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara perbedaan politik.

“Kita harus hilangkan ego, lalu juga memahami perbedaan, dan kita harus hormati beda pilihan siapapun di antara anak bangsa. Dan untuk tidak membangun politik yang berdasarkan identitas, SARA, fitnah dan narasi negatif lainnya,” ujarnya.

Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik. Yaqut menyampaikan hal tersebut di Garut, Jawa Barat, dalam rangka menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat.

“Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih,” kata Menag Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (3/9/2023).

Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.

“Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, *rahmatan lil ‘alamin*, rahmat untuk semesta alam. Bukan *rahmatan lil Islami*, tok,” kata Menag.

Karena itu pemimpin yang ideal, menurutnya, harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan.

“Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih,” katanya.

Selain Ujang, ada juga pengamat politik lainnya yang menyuarakan ketidaksetujuan dengan pernyataan Menag Yaqult. Salah satunya Pakar komunikasi politik, Karim Suryadi mengkategorikan candaan Menteri Agama sebagai bentuk politik identitas yang sesungguhnya.¹⁰

Adu sindiran tentang narasi politik identitas dari Menag Yaqut direspon serius oleh kubu AMIN, terutama PKB Muhamimin. Akhirnya, menimbulkan ketegangan dari dua belah pihak. Yaqut menyindir AMIN sebagai pasangan politik identitas, sementara kubu AMIN menilai Yaqut sebagai *buzzer*. Kubu AMIN, melalui PKB, juga mengultimatum Yaqut bahkan berupaya memberikan sanksi administrasi baginya di PKB. Berikut narasi beritanya:

Internal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar alias **Cak Imin** diisukan berseteru dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. Keduanya disebut saling senggol gara-gara statement Yaqut yang dinilai memancing spekulasi.¹¹

¹⁰ Angie Meidyana, "Menteri Agama Disebut Mainkan Politik Identitas", <https://www.metrotvnews.com/play/bD2CZ4pX-menteri-agama-disebut-mainkan-politik-identitas>. Diakses: 05 Oktober 2023, Pukul 19:35 WIB.

¹¹ Hendrik Khoirul Muhid, "Menjelang Pemilu Fakta-Fakta Gesekan Cak Imin dengan Gus Yaqut", <https://pemilu.tempo.co/read/1780157/menjelang-pemilu-2024-fakta-fakta-gesekan-cak-imin-dengan-gus-yaqut>. Diakses: 05 Oktober 2023, Pukul 14:50 WIB.

Saat acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Solo pada Jumat, 29 September 2023, Yaqut Cholil selaku kader PKB, menyampaikan pandangannya soal kriteria memilih pemimpin, menjelang Pemilu 2024. Ia mengajak supaya tak memilih pemimpin yang hanya pandai berbicara dan bermulut manis, serta yang memakai agama untuk kepentingan politik.

Pernyataan tersebut menuai polemik. PKB menilai ungkapan Yaqut Cholil menimbulkan spekulasi. Akibatnya, pihak partai akan memberikan sanksi kepada Yaqut Cholil atas pernyataannya. Yaqut Cholil mengaku tak ada yang salah dengan statementnya. Sementara di sisi lain, Cak Imin menganggap Yaqut Cholil sebagai buzzer.

Menjelang Pemilu 2024, berikut fakta-fakta gesekan antara Cak Imin dengan Gus Yaqut.

Sebelum membuat pernyataan di acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Solo, Gus Yaqut sebenarnya sudah mengungkapkan statemen serupa saat Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat, Ahad, 3 September 2023.

Menteri Agama mengimbau masyarakat agar tidak memilih calon pemimpin yang pernah memecah-belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik. Dia juga meminta tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Menurutnya, agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh masyarakat.

“Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil ‘alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok,” kata Gus Yaqut.

PKB akan mendisiplinkan Yaqut Cholil. Rencana ini muncul setelah Menteri Agama itu dianggap mengeluarkan pernyataan yang membuat publik berspekulasi dan bingung. Wakil Ketua

Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan sanksi tersebut merujuk pada pernyataan Yaqut di Solo. Menurut Jazilul pernyataan Menteri Yaqut menggiring opini yang tidak perlu.

“Jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara. Ini hoaks kok dari Menteri Agama, yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama,” kata dia di Jakarta pada Senin, 2 Oktober 2023.

Menurut Jazilul mestinya Yaqut hati-hati menjaga mulutnya. Pasalnya yang bersangkutan merupakan pejabat publik. Menurut Jazilul tanpa diberitahu Yaqut, rakyat sudah lebih tahu bagaimana memilih pemimpin. Sebab itu, Jazilul mempertanyakan tujuan Yaqut menyampaikan pernyataan soal memilih pemimpin itu ke publik.

“Untuk apa mengeluarkan *statement* begitu. Buang-buang omongan yang enggak perlu,” katanya.

Pada 2 Oktober lalu Yaqut mengakui belum menerima surat panggilan dari partainya. Perihal pernyataan Jazilul, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor itu mengatakan, tak ada yang salah dari pernyataannya soal cara memilih pemimpin agar selektif dan melihat rekam jejak calon yang akan berlaga di Pilpres 2024.

“Mengajak rakyat untuk memilih dengan cara cerdas itu dianggap kesalahan, ya *monggo* (silakan),” katanya.

Ketum PKB yang juga bakal cawapres Muhammin Iskandar menyebut Yaqut Cholil Qoumas layaknya buzzer. Hal itu diungkapkannya sebagai tanggapan terhadap tuduhan Yaqut iihwal politik identitas digunakan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019. Pernyataan itu dinilai sebagai sindiran untuk pasangan Anies Baswedan-Muhammin Iskandar. Selain itu, Anies merupakan Gubernur DKI Jakarta terpilih pada Pilgub 2017.

“Ah, itu omongan buzzer,” kata Cak Imin usai memimpin Parade dan Apel Hari Kesaktian Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Ahad, 1 Oktober 2023.

Menteri Yaqut menanggapi cap buzzer yang dilontarkan Cak Imin. Ia mengatakan baru tahu tanggapan Ketum PKB yang merespons pernyataannya yang meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin.

“Gak papa, biasa aja, selama saya meyakini apa yang saya sampaikan sebuah kebenaran ya silakan, menyebutnya apa saja,” kata Yaqut ditemui usai menyampaikan laporan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Oktober 2023.

Meskipun demikian, Yaqut merasa tak ada friksi antara dirinya dengan Muhamimin. “Friksinya di mana sih?” tanya dia singkat

Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor pusat, Abdul Qodir, siap melaporkan dugaan politisasi agama pada Pemilu 2024. Menurutnya, salah satu yang potensi pemicu konflik adalah politisasi agama. Sejarah, kata dia, telah mengajarkan bahwa politisasi agama hanya akan mendatangkan pertikaian umat manusia dan kehancuran peradaban.

“Masyarakat yang mendapatkan penggunaan agama sebagai alat politik atau politisasi agama dapat menyampaikan kepada kantor LBH Ansor di 170 titik di seluruh Indonesia, agar kami dapat mendampingi dan mengawal pelaporannya ke pengawas Pemilu,” kata Qodir di Jakarta seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin, 2 Oktober 2023.

ProofRead
SB

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Hasanuddin dan Lilik Purwandi. 2017. *Milenial Nusantara*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Ahdori, Abdul Rahman. "Moderasi Beragama Diperlukan Agar Politik Identitas Tidak Muncul". <https://www.nu.or.id/nasional/moderasi-beragama-diperlukan-agar-politik-identitas-tidak-muncul-YUM4u>. Diakses pada 05 Oktober 2023. Pukul 19:58 WIB.

Bagir, Zainal Abidin. 2011. *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Mizan dan CRCS. Yogyakarta.

Clarke, Ronald V.. 1997. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. 2nd Edition. Criminal Justice Public Relation. New York.

Cotterrell, Roger. 2013. *Law, Culture, and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory (Law, Justice, and Power)*. 1st Edition. Ashgate Publishing. Farnham.

Emirzon, Joni. 2007. *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Cetakan Pertama. Genta Press. Yogyakarta.

Hall, Stuart dan Paul du Gay. 1996. *Questions of Cultural Identity*. 1st Edition. Sage Publications Ltd. Thousand Oaks.

Indah. "Menag: Jangan Pilih Pemimpin yang Gunakan Agama Sebagai Alat Politik". <https://kemenag.go.id/pers-rilis/menag-jangan-pilih-pemimpin-yang-gunakan-agama-sebagai-alat-politik-Qy1Bg>.

Kumolo, Tjahjo. 2018. *Ini Syarat Pemilu yang Sukses, Aman, dan Demokratis*. Download February 11th, 2019, <http://www.zonalima.com/artikel/13655/Ini-Syarat-Pemilu-yang-Sukses-Aman-dan-Demokratis/>

Maarif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Democracy Project. Jakarta. Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2013. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Edition. SAGE Publications Inc. Thousand Oaks.

Mantalean, Vitorio. "Ganjar Tampil di Siaran Azan Bawaslu Akui Sulit Jadikan Pelanggaran". <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/13/09273771/ganjar-tampil-di-siaran-azan-bawaslu-akui-sulit-jadikan-pelanggaran>.

Meidyana, Anggie. "Menteri Agama Disebut Mainkan Politik Identitas". <https://www.metrotvnews.com/play/bD2CZ4pX-menteri-agama-disebut-mainkan-politik-identitas>. Diakses: 05 Oktober 2023, Pukul. 19:35 WIB.

Muhid, Hendrik Khoirul. "Menjelang Pemilu Fakta-Fakta Gesekan Cak Imin dengan Gus Yaqut", <https://pemilu.tempo.co/read/1780157/menjelang-pemilu-2024-fakta-fakta-gesekan-cak-imin-dengan-gus-yaqut>. Diakses: 05 Oktober 2023, Pukul. 14:50 WIB.

Proofread
Mursid, Fauziyah. "Pengamat: Pernyataan Menag Justru Picu Perpecahan". [98 • Pendidikan Politik Kebangsaan](https://news.republika.co.id/berita/s0i6f8330/pengamat-pernyataan-menagjustru-picu-perpecahanNasrullah, Rulli. 2015. <i>Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi</i>. Simbiosa Rekatama Media. Jakarta.</p></div><div data-bbox=)

- Nicholson, Linda. 2008. *Identity Before Identity Politics*. 1st Edition. Cambridge University Press. London.
- Nimmo, Dan. 2009. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu (Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, dan Presiden)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Reith, Charles. 1975. *Blind Eye of History: A Study of the Origins of the Present Police Era (Criminology, Law Enforcement, and Social Problems)*. Patterson Smith Publisher. New Jersey.
- Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press. Yogyakarta. Sebastian, Yoris dan Dilla Amran. 2016. *Generasi Langgas: Millenials Indonesia*. Transmedia. Jakarta.
- Saputro, Febrianto A. "Muncul di Tayangan Azan, Ganjar: Tidak Pernah Saya Gunakan Politik Identitas". <https://news.republika.co.id/berita/s18r4o330/muncul-di-tayangan-adzan-ganjar-tidak-pernah-saya-gunakan-politik-identitas>. Diakses. 03 Oktober 2023. Pukul. 00:03 Wib
- Suharto. 2005. *Eksplorasi terhadap Anak dan Wanita*. CV. Intermedia. Jakarta.
- Suharto, Babun. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*, LkiS: Yogjakarta, 2019.
- Tainter, Joseph A.. 1990. *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge University Press. London.
- Wawancara dengan Ray Rangkuti pada acara Sapa Indonesia Pagi, Edisi 18 Oktober 2023, Pukul. 07:50 WIB.

Proofread
SB

ProofRead
SB

PROFIL PENULIS



Wira Hadikusma, M.Si. Lahir di Biaro Lama, 01 Januari 1986. Saat ini penulis adalah dosen aktif di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, mengampu mata kuliah Resolusi Konflik dan Sejarah Dakwah. Selain mengajar, penulis juga aktif pada birokrasi kampus selaku Ketua Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pengalaman menulis juga cukup banyak, mulai dari artikel internasional hingga terakreditasi Sinta, di antaranya adalah "Kontekstualisasi Konsep Perang Dalam Perspektif Sosiologis-Normatif" dalam Jurnal Mizani, "Mendialogkan Sains dan Agama dalam Upaya Resolusi Konflik" dalam Jurnal Syiar, "Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Santri Melalui Peningkatan Kecerdasan Spiritual di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Jawa Timur" dalam Jurnal JOEAL. Penulis juga aktif pada forum Moderasi Beragama dalam Perspektif Negosiasi Wajah pada Masyarakat Bengkulu Utara dan aktif sebagai Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu.



Musyaffa, M. Sos., seorang putra transmigran, putra Sumatera, berdarah Jawa. Ia lahir di Giri Mulya, Bengkulu Utara, pada 28 Desember 1990. Namun, pendidikan dasar hingga menengah, ia tempuh di Jambi. Musyaffa melanjutkan pendidikan tinggi di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Ia pun selesai dan lulus dengan gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos.I) pada Februari 2014. Ia tak langsung melanjutkan studi magister. Melainkan, ia kursus Bahasa Inggris di Kampung Inggris, Pare, Kediri, Jawa Timur, hingga awal Januari 2015. Pria yang fokus pada bidang jurnalistik ini, akhirnya mengikuti seleksi jurnalis jaringan Kompas Gramedia, di Tribun Jambi. Namun, pada Maret 2015, ia justru memilih melanjutkan studi Magister pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akhirnya, pada 2018 ia selesai dan mendapatkan gelar Magister Sosial (M. Sos).

Sebelum ia bergelut di bidang akademik, Musyaffa menjadi pekerja sosial, ia lulus dan mengabdikan diri menjadi Pendamping Sosial PKH Kementerian Sosial wilayah tugas Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, selama 2018-2019. Sebab, pada Januari 2019, ia resmi lulus sebagai Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil. Selama menjadi dosen, ia didaulat untuk mengampu beberapa mata kuliah core, seperti Jurnalistik, Etika Komunikasi Islam, Sistem Komunikasi Indonesia, Sosiologi Komunikasi, dan Jurnalistik Dakwah. Selain pengajar, ia juga seorang peneliti dan penulis. Hasil penelitian dan kajiannya diterbitkan dalam bentuk jurnal dan buku. Fokus kajiannya pada dakwah dan media, hal tersebut setidaknya tercermin pada beberapa karyanya, antara lain: *Framing Situs Berita Daring Lokal pada Pemilihan Gubernur Bengkulu 2020* (2023), *Hukum Islam dan Implementasinya terhadap Hukum Positif di Indonesia* (2023). *Pemikiran dan Gerakan Dakwah Syeikh Nuruddin Ar-Raniry* (2018). *Berita Hoaks vs Berita Layak: Tipologi Khalayak Media Sosial Perspektif Fikih Jurnalistik*. *Hate Speech: Perspektif dan Etika Di*

Media Siber (2022). Pendampingan Literasi Media dan Diseminasi Berita Layak Islami terhadap Mahasiswa di Bengkulu (2022). Desiminasi Dakwah Gus Baha' dan Antusiasme Netizen di Media Sosial (2022). E-Jihad dan Fenomena Kebangkitan Islam (2020). Tesis Konstruksi Pemberitaan Media Online Indonesia terhadap ISIS (Analisis Framing Kompas.com, Okezone.com, Tempo.co, dan Republika.co.id) (2017).



Pebri Prandika Putra. Penulis lahir di Kayu Agung, Sumatera Selatan, pada 03 Februari 1989. Ia menghabiskan masa pendidikan formal di kota Bengkulu lalu melanjutkan studi S-1 Pendidikan Bahasa Inggris di IAIN Bengkulu tahun 2008 sebelum melanjutkan studi ia pernah mengajar di almamaternya sebagai Asisten Dosen tahun 2012. Ia kemudian memilih mengambil S-2 Linguistik Terapan (Applied Linguistics) konsentrasi Penerjemahan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada tahun 2013. Sekarang penulis aktif bekerja sebagai dosen tetap di IAIN Bengkulu mengajar bidang studi Translation. Selain mengajar penulis juga aktif dalam penulisan jurnal baik berskala lokal, nasional hingga internasional sejak tahun 2013. Berikut beberapa tulisan yang pernah diterbitkan oleh penulis; "The Use of Mind Mapping to Improve students Writing Achievement" (IJHSS Journal International November 2013), "Contrastive Analysis System Kala and Past Tense" (Journal Linguists), "Translation Technique in Biography Suharto" (Journal Linguist), "Translation Ideology in Tourism Book" (Journal Linguist), "Analysis Turn Taking in Movie" (IAIN Bengkulu), "Makna Leksikal dan Teknik Penerjemahan" (UNJ), "Penerjemahan Bahasa Inggris-Indonesia", "Teknik dan Ideologi Penerjemahan", "Analisis Wacana Kritis", dan masih ada yang lainnya.

ProofRead
SB